



2024

LKj IP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar menyelenggarakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan.

Melalui Peraturan Daerah diatas maka disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk memastikan capaian kinerja optimal. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan rencana dan program kerja badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi penganggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi, dan aset daerah;
- c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan Badan;

- d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain berdasarkan tugas yang diberikan Bupati.

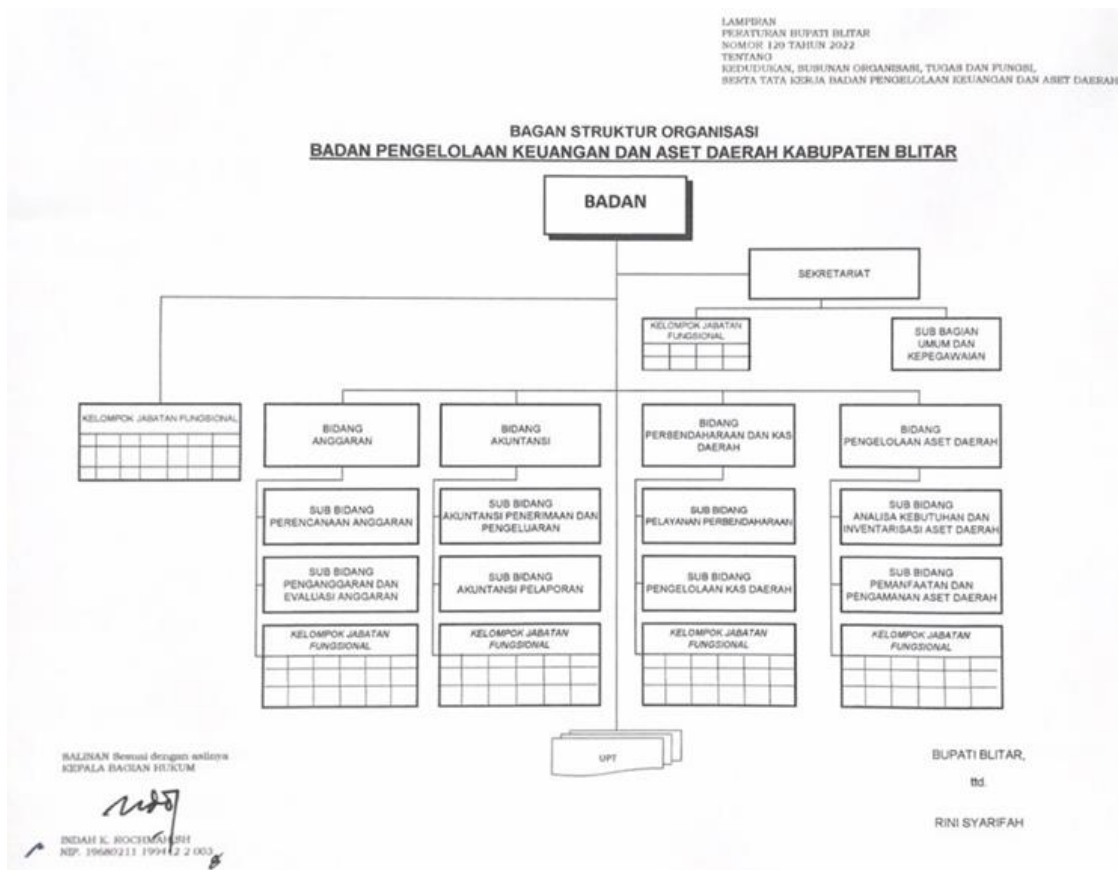
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar, maka disusun struktur organisasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dipimpin oleh Kepala Badan, yang dibantu oleh sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Anggaran, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Penganggaran dan Evaluasi Anggaran; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Aset Daerah;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
 - b. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelayanan Teknis (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1:

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blitar



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar memiliki ASN sebanyak 43 Orang. ASN tersebut terbagi ke dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024

Tabel 1.1

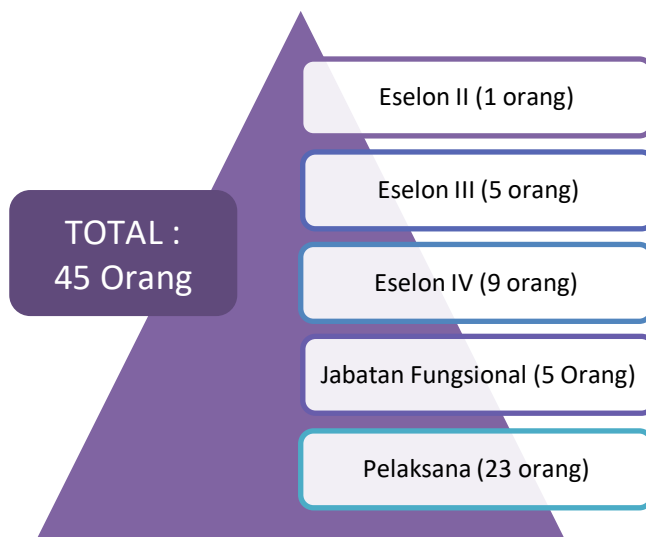
Data ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blitar

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala BPKAD	1 Orang
2	Administrator	5 Orang
3	Pengawas	9 Orang
4	Pelaksana	23 Orang
5	Jabatan Fungsional Ahli Muda	5 Orang
	Total	43 Orang

Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada BPKAD Kabupaten Blitar dititikberatkan untuk mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2021-2026, khususnya misi ke-3 yaitu **“Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas”**. Saat ini, BPKAD Kabupaten Blitar didukung oleh 44 Orang PNS. Dengan didasari atas keberagaman komposisi kepegawaian baik dari sisi usia, jenis kelamin (gender), golongan maupun tingkat pendidikan. Penerapan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk memenuhi kompetensi BPKAD Kab. Blitar secara organisasi dan mengembangkan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

Dilihat dari tingkat eselonnya, di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar terdapat 1 orang eselon II, Eselon III sebanyak 5 orang. Sedangkan jumlah Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana secara berturut-turut sebesar 9 orang, 5 orang dan 24 orang.



Tabel 1.2.1

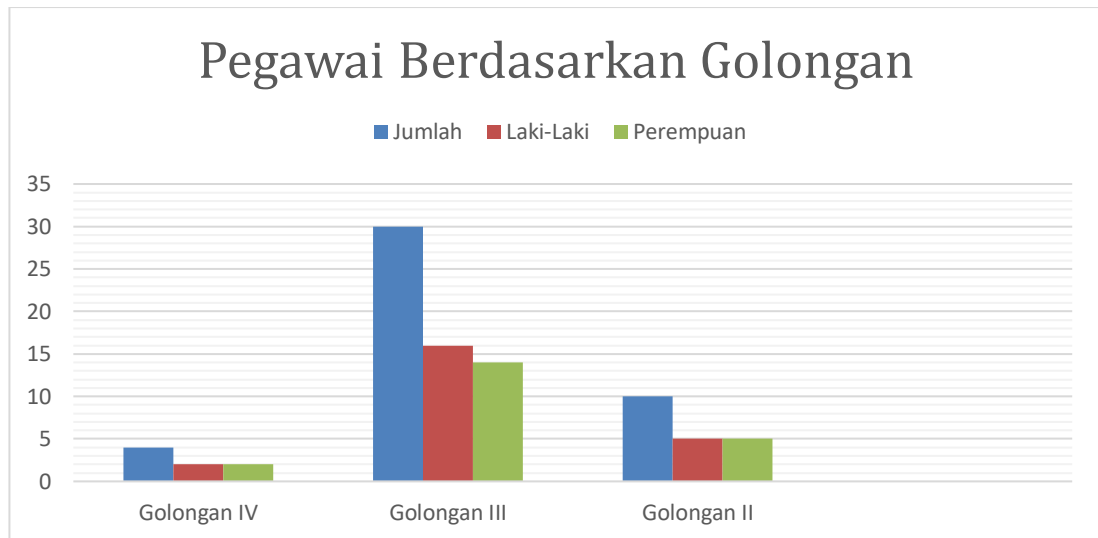
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Eselonisasi

No	Kelompok Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II b	1	-	1
2.	Eselon III a	-	1	1
3.	Eselon III b	2	2	4
4.	Eselon IV a	7	2	9
5.	Jabatan Fungsional	3	2	5
6.	Jabatan Pelaksana	8	15	23
TOTAL		21	22	43

Sumber Data : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Dilihat dari tingkat golongannya, sebagian besar pegawai BPKAD Kabupaten Blitar berada di golongan III, yaitu sebanyak 30 orang. Sedangkan jumlah pegawai dengan golongan II dan IV secara berturut-turut sebesar 10 orang dan 4 orang.



Tabel 1.2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Golongan

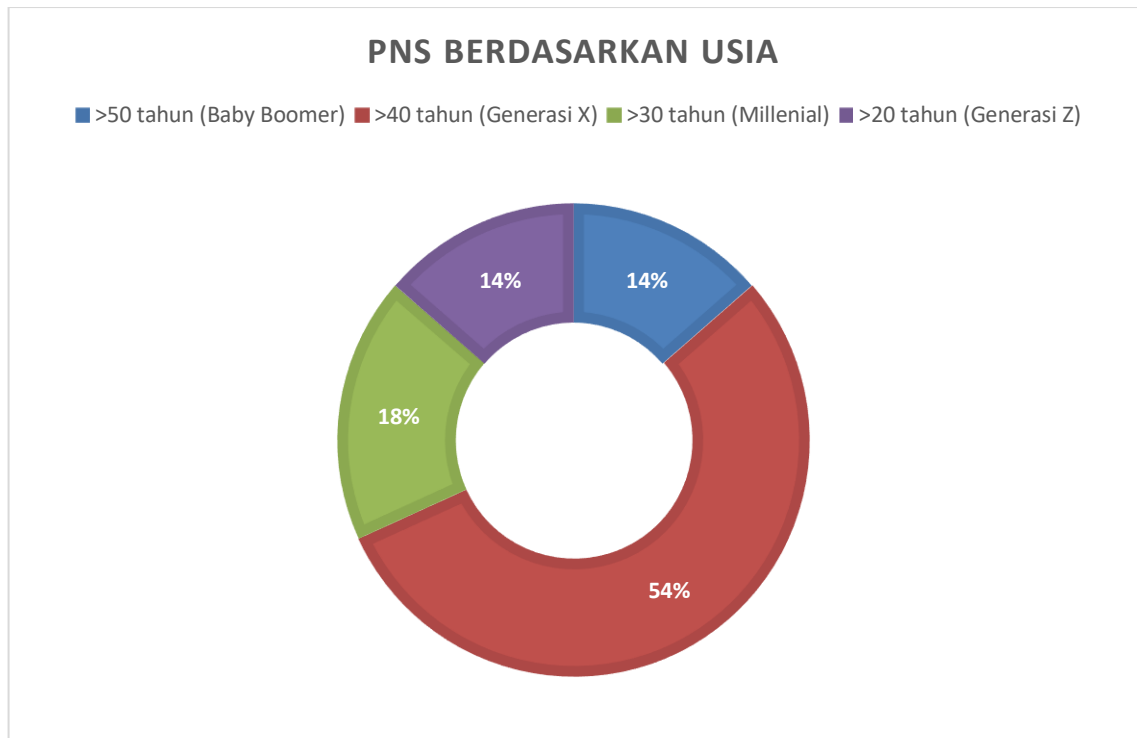
No	Kelompok Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	2	2	4
2.	Golongan III	15	15	30
3.	Golongan II	4	5	9
4.	Golongan I	-	-	-
TOTAL		21	22	43

Sumber Data : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Dilihat dari stuktur komposisi usia, pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Blitar masih tergolong dalam usia produktif, dimana komposisi pegawai masih didominasi oleh kelompok Generasi X (usia lebih dari 40 tahun) yaitu sebanyak 26 pegawai (25,27%). Pegawai dari kelompok Generasi Millenial (lebih dari 30 tahun kurang dari 40 tahun) berjumlah 9 pegawai (20,45%), Kelompok Baby Boomers berjumlah 3 pegawai (6,82%) dan Kelompok Generasi Z berjumlah 9 pegawai (20,45%)

Dengan postur SDM yang demikian, diharapkan manajemen pengelolaan SDM di BPKAD Kabupaten Blitar mampu menciptakan sumber daya yang inovatif untuk mendukung kemajuan organisasi.

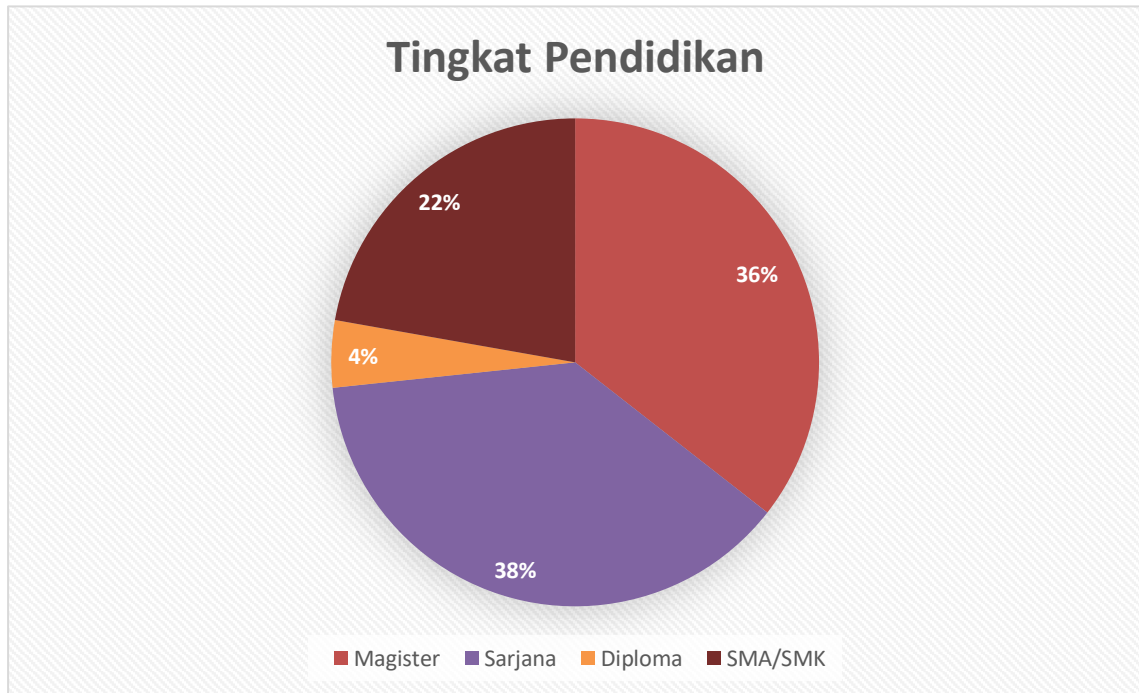
**Tabel 1.2.3**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

No	Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	> 50 tahun (BB)	0	3	3
2.	> 40 tahun (X)	12	9	21
3.	> 30 tahun (Mill)	4	7	11
4.	> 20 tahun (Z)	5	3	8
	TOTAL	21	22	43

*Sumber Data : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar***Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Dilihat dari struktur tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai BPKAD Kabupaten Blitar telah berpendidikan tinggi. Berdasarkan data kepegawaian per November 2022, sebanyak 16 pegawai (36%) dari total jumlah pegawai BPKAD Kabupaten Blitar (45 orang) telah memperoleh pendidikan S2; sebanyak 17 pegawai (38%) telah memperoleh pendidikan S1; sebanyak 2 pegawai (4%) berpendidikan DIII, sementara yang lainnya sebanyak 10 pegawai (22%) memiliki pendidikan SMA/ DI ke bawah.



Tabel 1.2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S-2	6	6	12
2.	S-1	9	8	17
3.	Diploma	2	3	5
4.	SMA/ SMK	4	5	9
TOTAL		21	22	43

Sumber Data : Data Kepegawaian BPKAD Kab. Blitar

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi pada BPKAD Kabupaten Blitar, maka kondisi ideal jumlah kebutuhan PNS sebanyak 63 orang, yang terdiri dari 15 pejabat struktural 7 Pejabat Fungsional dan 41 pelaksana.

Sarana Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/ tupoksi pada BPKAD Kabupaten Blitar didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai. Aset pada BPKAD Kabupaten Blitar terbagi dalam bidang barang, yaitu (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Irigasi, Jaringan, (5) Aset Tetap Lainnya, (6) Aset Tak Berwujud.

Barang Milik Daerah (BMD) tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada BPKAD Kabupaten Blitar, cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Blitar selama 5 (lima) tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan gedung/ ruangan, revitalisasi ruang arsip, pengadaan barang inventaris kantor/ rumah tangga, alat angkutan/ kendaraan dinas, alat-alat studio/ komunikasi.

Selengkapnya, data Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset) pada BPKAD Kabupaten Blitar sebagaimana pada **Tabel 1.2.5** dan **Tabel 1.2.6**

Tabel 1.2.5

Data Sarana dan Prasarana pada BPKAD Kabupaten Blitar
(Kondisi per Desember 2024)

NO	JENIS ASET	NILAI	KET.
1	Tanah	76.652.621.014,00	
2	Peralatan dan Mesin	7.624.395.998,47	
3	Gedung dan Bangunan	22.207.638.842,00	
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	397.079.150,00	
5	Aset Tidak Berwujud	615.188.500,00	
5	Aset Lain-Lain	696.010.101,00	
	Jumlah	106.881.735.004,47	

Sumber Data : Data BMD BPKAD Kab. Blitar, 2024

Tab0el 1.2.6

Daftar Perlengkapan BPKAD Kabupaten Blitar

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1.	Sepeda Motor Roda Dua	26 Unit	
2.	Mesin Foto Copy	1 Unit	
3.	AC Split	15 Unit	
4.	Kipas angin	4 Unit	
5.	PC Unit	38 Unit	
6.	Laptop	22 Unit	
7.	Tablet	4 Unit	
8.	Printer	55 Unit	
9.	Scaner	4 Unit	
10.	Server	1 Unit	
11.	Meja Kerja	38 Unit	
12.	Meja Rapat	1 Set	
13.	Kursi Kerja	60 Unit	
14.	Kursi Rapat	37 Unit	
15.	Kursi Tamu	3 Set	
16.	Proyektor	8 Unit	
17.	Layar Slide	2 Unit	
18.	Telepon	4 Unit	
19.	Faximile	1 Unit	
21.	Monitor	23 Unit	
22.	Hub	2 Unit	
23.	Jaringan	2 Set	
24.	Tustel	2 Unit	
25.	Mesin Hitung	22 Unit	
26.	Mesin Ketik Manual	1 Unit	
27.	GPS	2 Unit	
28.	Mobil Roda 4	1 Unit	
29.	Mesin Foto Copy	1 Unit	

30.	Lemari	6 Unit	
31.	Rak Besi	2 Unit	
32.	Filling Cabinet	15 Unit	
33.	Brangkas	2 Unit	
34.	Lemari Kaca	11 Unit	
35.	Alat Penghancur Kertas	3 Unit	
36.	Lemari Es	2 Unit	
37.	Jam Elektronik	7 Unit	
38.	Waterpump	3 Unit	
39.	Mesin Potong rumput	4 Unit	
40.	Televisi	3 Unit	
41.	Sound system	7 Unit	
42.	Wireless	1 set	
43.	Camera video	32 Unit	
44.	Dispenser	2 Unit	
45.	Pemadam	3 Unit	
46.	Alat Kantor Lainnya	45 Unit	
47.	UPS	4 Unit	
48.	Mesin Absensi	2 Unit	
49.	Whiteboard	5 Unit	
50.	Sice	1 Unit	

Sumber Data : Data BMD BPKAD Kab. Blitar, 2024

B. Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh Perangkat Daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang

dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.

Tabel 1.2

Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belum optimalnya penerapan sistem informasi keuangan daerah berbasis digital	Sistem/ Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Sistem Pengelolaan Aset Daerah belum terintegrasi, mengakibatkan pengolahan data keuangan dan aset membutuhkan waktu yang relatif lama proses untuk rekonsiliasi
2	Implementasi Reformasi Birokrasi	Lemahnya penerapan budaya kerja organisasi	Terdapat perbedaan tingkat pemahaman aparatur tentang pentingnya budaya kerja organisasi
3	Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel	Kualitas pelayanan publik yang belum optimal	Pelayanan publik belum berbasis teknologi informasi dan SOP Pelayanan Publik belum dievaluasi secara berkala
4	Pendapatan Asli Daerah berbasis Pemanfaatan Aset	Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan	Belum dilaksanakannya penilaian aset secara berkala sebagai dasar penetapan harga sewa aset
5	Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja	Realisasi anggaran yang sering terlambat dan tidak sesuai dengan perencanaan awal	Kurangnya mekanisme pemantauan berkala untuk memastikan anggaran terealisasi sesuai rencana

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah (penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan) akan menyesuaikan SIPD yang dapat diintegrasikan dengan Aplikasi Pengelolaan BMD, dimana sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan KUA-PPAS, Perubahan KUA PPAS, RKA, RKA-P, DPA, DPPA, Penyusunan APBD, Perubahan APBD, pencairan, dan pelaporan;
2. Tuntutan Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi, melalui Optimalisasi Implementasi Penyederhanaan Birokrasi, Penguatan Budaya Kerja Organisasi, Penguatan Kinerja Organisasi, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembangunan Zona Integritas;
3. Tantangan Penyediaan Layanan Publik Yang Lebih Cepat, Baik dan Murah Berbasis Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, berbasis Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Tantangan penguatan kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dari potensi-potensi baru, dan penekanan beban alokasi belanja pegawai daerah yang sesuai dengan ketentuan;
5. Tantangan penganggaran yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung program-program prioritas pembangunan daerah;
6. Tantangan peningkatan pelayanan perbendaharaan dan kas daerah yang efektif dalam rangka mendukung realisasi penyerapan APBD sesuai dengan ketentuan;
7. Tantangan pengelolaan aset daerah yang lebih efektif, melalui peningkatan kapasitas Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu, Pejabat Panatausahaan BMD dan percepatan penyelesaian masalah aset daerah;

8. Tantangan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih efektif, melalui peningkatan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada PD;
9. Pengalokasian/ penambahan SDM yang sesuai dengan Standar Kebutuhan Pegawai/ Analisa Beban Kerja pada BPKAD Kabupaten Blitar
10. Optimalisasi pengelolaan data dan arsip pengelolaan keuangan dan aset daerah pada BPKAD Kabupaten Blitar

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun

2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blitar;
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar

D. Sistematika Dokumen

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

- A. Penjelasan Umum Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Indikator Kinerja Utama
- D. Perjanjian Kinerja

E. Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

B. Capaian Kinerja Organisasi

1. Menjelaskan definisi operasional dari setiap indikator kinerja;
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
6. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Pemecahan Masalah

C. Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki visi TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (*BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR*). Dalam dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar adalah Misi 3: Pengoptimalan Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas.

B. Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Blitar maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

Tujuan :

Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Tujuan:				
	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja	Nilai dan Predikat SAKIP Pemerintah Daerah	SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemda adalah penjelasan rinci tentang bagaimana indikator kinerja yang digunakan dalam SAKIP akan diukur dan dievaluasi, agar pelaksanaannya efektif dan efisien, meliputi Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Hasil Evaluasi SAKIP Pemda oleh Kemenpan RB	Kepala BPKAD
	Sasaran:				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah evaluasi kinerja secara berkala meliputi Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP BPKAD	Kepala BPKAD

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan suatu daerah. IPKD mengukur efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam periode tertentu, berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020	RPJMD, RKPD, KUA PPAS, APBD, LKPD	Kepala BPKAD
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	Perbandingan antara Nilai BMD pada Neraca BMD Pemkab Blitar dengan Nilai Aset Tetap pada Neraca Keuangan Pemkab Blitar, untuk melihat kualitas pengelolaan dan pencatatan BMD	Necaca BMD Pemkab Blitar, LKPD (Neraca)	Kepala BPKAD

D. Perjanjian Kinerja

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2024 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80/ A
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	71
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	87%

E. Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 411.117.352.585,00 Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun Rp. 417.414.558.771,00 sebesar dengan rincian sebagai mana Tabel 2.2.

Tabel 2.3
Rincian Anggaran Pada Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.713.225.324	12.689.483.372
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	51.000.000
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	51.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.687.975.765	6.220.326.117
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.463.748.265	5.992.798.617
2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	214.968.000	218.268.000
2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.259.500	9.259.500
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	309.300.000	403.950.000
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	309.300.000	403.950.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	810.229.504	1.086.380.391
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.004.419	21.004.419
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	241.465.635	344.312.184
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.007.315	17.023.293
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	180.722.176	173.803.536
4.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.529.959	436.236.959
4.6	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	94.500.000	94.000.000
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.197.817.609	1.446.066.557
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	625.000.000	625.000.000
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	566.960.694	815.209.642

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
5.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.856.915	5.856.915
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.327.875.362	1.587.875.362
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	564.200	564.200
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	445.712.000	705.712.000
6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	881.599.162	881.599.162
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.280.027.084	1.893.884.945
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.943.586	101.943.586
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.650.000	219.453.400
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.022.433.498	1.572.487.959
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		402.414.242.714
8	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.581.244.430	2.002.143.385
8.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	119.002.750	117.502.760
8.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	119.002.750	111.712.760
8.3	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	58.860.000	30.704.000
8.4	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	12.360.000	9.562.500

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
8.5	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	19.110.000	18.315.336
8.6	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	23.084.688	103.864.688
8.7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	830.209.205	990.620.837
8.8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	356.392.110	400.480.340
8.9	Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	43.222.927	89.660.000
9	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	246.393.808	246.393.808
9	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	143.144.600	148.035.500
9.1	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas, SPD	18.225.090	12.034.620
9.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimb dan Dana Transfer Lainnya	15.442.000	30.261.500
9.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	43.737.099	37.253.138
9.4	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	3.040.276	2.605.276

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
9.5	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Keg	3.429.832	2.829.832
9.6	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	19.374.911	13.373.942
10	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	420.168.600	420.168.700
10.1	Sub Kegiatan Koord Pelaks. Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	29.145.000	29.536.225
10.2	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	16.581.000	16.581.000
10.3	Sub Kegiatan Konsolidasi Lap Keu SKPD, BLUD dan Lap Keu Pemda	65.721.500	64.718.500
10.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Peny Ranc Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Ranc Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	123.949.622	124.952.622
10.5	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	19.120.000	19.120.000
10.6	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	39.435.000	39.435.000
10.7	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	50.397.000	41.315.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
10.8	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50.927.578	60.009.678
10.9	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	24.891.900	24.500.675
11	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	396.348.311.531	399.893.572.321
11.1	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	376.542.767.210	382.087.488.000
11.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	7.931.391.548	5.931.931.548
11.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	11.874.152.773	11.874.152.773
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.801.253.222	2.340.753.222
12	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.801.253.222	2.340.753.222
12.1	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	105.301.500	105.301.500
12.2	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	121.941.200	88.163.700
12.3	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	12.832.000	1.332.000
12.4	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.468.360	59.133.960
12.5	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	151.400.000	244.012.100
12.6	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	1.184.786.770	1.624.286.570
12.7	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	151.368.000	151.368.000
12.8	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	62.155.392	67.155.392
	Total Anggaran	411.117.352.585	417.414.558.771

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi

3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hasil pengukuran kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

No.	Sasaran	Realisasi	Predikat Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	73	Sedang
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	76,598	Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	98,13	Tinggi

B. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada tahun 2024. Berikut analisis capaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024:

1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dalam sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 91,25%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	80/A	73/BB	91,25%
Capaian Kinerja					91,25%

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator. Indikator Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah. meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Tahapan pertama dilaksanakan evaluasi/ penilaian mandiri oleh tim evaluator SAKIP BPKAD Kabupaten Blitar. Tahap Kedua dilakukan evaluasi oleh APIP. Berdasarkan tabel 3.3 diatas, indikator Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah dapat direalisasi sebesar 73/ BB dari target 80 A, sehingga dihasilkan capaian kinerja Sebesar 91,25%.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah mengalami peningkatan sebesar 9,25 bila dibandingkan tahun 2023, sebesar 63,75. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh penguatan perencanaan kinerja dengan nilai 24 atau meningkat sebesar 3,90 bila dibandingkan dengan nilai perencanaan kinerja tahun 2023 sebesar 20,10. Peningkatan ini didukung oleh ketersediaan dokumen

perencanaan kinerja yang memenuhi standar dan ukuran kinerja yang SMART-C, dengan menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan bidang lain (*crosscutting*). Sehingga dokumen perencanaan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dengan rincian sebagai berikut:

KOMPONEN SAKIP	BOBOT	NILAI 2022	NILAI 2023	NILAI 2024*)
Perencanaan Kinerja	30,00	27,32	20,10	24,00
Pengukuran Kinerja	30,00	20,00	18,30	21,00
Pelaporan Kinerja	15,00	13,93	8,85	10,50
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,38	16,50	17,50
TOTAL NILAI	100,00	80,63	63,75	73,00

*) Penilaian Mandiri

Berdasarkan data di atas, maka dapat disajikan perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 s.d. 2024:

Tabel 3.4
Perkembangan Kinerja
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun N (2024)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	80,63	63,75	73,00

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra pada Tahun 2021-2026, dimana selanjutnya akan dilaksanakan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra.

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun n	Persentase capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	82/A	73/BB	89,02

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/ Nasional maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Blitar perlu meningkatkan implementasi SAKIP dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/ Nasional. Perbandingan tersebut dilakukan dengan membandingkan Nilai SAKIP Kabupaten Blitar dengan Nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur, dan BPKAD Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja di Tingkat Provinsi Jawa Timur/ Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi/ Nasional Tahun 2024	Keterangan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	73/BB	67,16/ B	Kab. Blitar
				93,43/ AA ¹	BPKAD Prov. Jatim
				64,23/B ²	Nilai Rerata Pemkab/ Kota Se-Indonesia

Sumber:

1. <https://ro-organisasi.jatimprov.go.id/dashboard/sakip>
2. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tren-kenaikan-sakip-selama-10-tahun-menteri-panrb-korelasi-positif-akuntabilitas-kinerja-dengan-akselerasi-pembangunan-dan-pengentasan-kemiskinan>

Untuk mencapai target kinerja di atas, pada Tahun 2024 BPKAD Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Penguatan Perencanaan Kinerja, melalui penyusunan dokumen perencanaan kinerja, dengan melibatkan seluruh ASN, melalui desk, bimbingan teknis, dan rapat evaluasi internal;
2. Peningkatan kualitas pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan;
3. Penyusunan Laporan Kinerja sesuai standar yang menggambarkan kualitas capaian kinerja, faktor pendorong dan penghambat serta upaya perbaikan;
4. Optimalisasi pelaksanaan evaluasi internal terhadap kinerja kelembagaan, agar lebih berdampak dalam pelaksanaan tugas

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah terkait dengan: tingkat pemahaman terhadap perkembangan peraturan implementasi SAKIP antara ASN satu dengan yang lainnya tidak sama;

Realisasi kinerja di atas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 12.641.787.499,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.112.072.008,00 (87,57%). Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah:

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	89,02%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.689.483.372	11.112.072.008	87,57
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.000.000	50.699.250	99,41
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.000.000	50.699.250	99,41
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.220.326.117	5.678.446.679	94,85
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.992.798.617	5.453.948.879	91,01
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	218.268.000	215.728.000	98,84
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.259.500	8.769.800	94,71
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	403.950.000	365.657.000	90,52
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	403.950.000	365.657.000	90,52
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.086.380.391	1.045.886.377	97,37
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.004.419	20.865.500	99,34
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	344.312.184	337.101.866	97,91
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.023.293	16.110.000	94,64
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	173.803.536	173.063.050	99,57
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	436.236.959	404.745.961	92,78

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			
				Alokasi	Realisasi	%	
			SKPD				
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	94.000.000	94.000.000	100,00	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.446.066.557	1.275.281.800	59,08	
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	625.000.000	557.506.800	89,20	
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	815.209.642	717.775.000	88,05	
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.856.915	0	0,00	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.587.875.362	1.390.274.696	73,98	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	564.200	275.685	48,86	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	705.712.000	545.455.651	77,29	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	881.599.162	844.543.360	95,80	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.893.884.945	1.305.826.206	75,89	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.943.586	64.693.114	63,46	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	219.453.400	217.504.092	99,11	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.572.487.959	1.023.629.000	65,10	
			Tingkat efisiensi				3,68%

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan di atas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 91,25% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 87,57%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan nilai efisiensi sebesar 3,68%.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas ASN terkait dengan Implementasi SAKIP melalui FGD/ Bimtek/ Sosialisasi;
2. Peningkatan pemahaman Budaya Kerja terkait dengan optimalisasi rembug kinerja pada masing-masing bidang.

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 107,88%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	71	76,598	107,88%
Capaian Kinerja					107,88%

1. Indeks Dimensi Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD (nilai 15);
2. Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (nilai 20);
3. Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (nilai 15);
4. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD (nilai 20);
5. Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah (nilai 15); dan
6. Opini BPK (nilai 15).

Tahapan pertama dilaksanakan evaluasi/ penilaian mandiri oleh tim evaluator SAKIP BPKAD Kabupaten Blitar, pada Bulan Januari s.d. Februari 2025 dengan menggunakan data keuangan daerah/ LKPD bersifat sementara. Hal tersebut dikarenakan LKPD belum dilaksanakan audit oleh BPK RI. Berdasarkan tabel 3.3 diatas, indikator IPKD dapat direalisasi sebesar 76,598 dari target 71, sehingga dihasilkan capaian kinerja sebesar 107,88%.

[illegible]

*) Penilaian Mandiri

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami peningkatan sebesar 3,89 bila dibandingkan tahun 2023, sebesar 72,7080. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh penguatan peningkatan dimensi 1: Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD dengan nilai 14,6800 atau meningkat sebesar 7,51 bila dibandingkan dengan nilai perencanaan kinerja tahun 2023 sebesar 7,1700. Peningkatan ini didukung oleh konsistensi antar dokumen perencanaan, meliputi:

1. Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
 - a. Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD
 - b. Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA PPAS
 - c. Kesesuaian Nomenklatur Program KUA PPAS dan APBD
 - d. Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA PPAS
 - e. Kesesuaian Pagu Program KUA PPAS dan APBD
2. Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD;
 - a. Penyediaan Alokasi Anggaran Belanja untuk Fungsi Pendidikan sebesar 20%
 - b. Penyediaan Alokasi Anggaran Belanja untuk Urusan Kesehatan sebesar 10%
 - c. Penyediaan Alokasi Anggaran Belanja untuk Infrastruktur sebesar 25%
 - d. Penyediaan Alokasi Anggaran Belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - a. Ketepatan Waktu
Merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan daerah oleh pemerintah

daerah melalui Sistem informasi Pemerintahan Daerah secara tepat waktu dengan memperhatikan masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 hari kalender setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Keteraksesan

Merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk public melalui system informasi pemerintahan daerah, sekurang-kurangnya 2 tahun anggaran.

4. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD;

- a. Penyerapan Anggaran Belanja Operasional
- b. Penyerapan Anggaran Belanja Modal
- c. Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Terduga
- d. Penyerapan Anggaran Belanja Transfer

5. Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah;

- a. Kemandirian Keuangan
- b. Fleksibilitas Keuangan
- c. Solvabilitas Keuangan
- d. Solvabilitas Jangka Pendek
- e. Solvabilitas Jangka Panjang
- f. Solvabilitas Layanan

6. Opini BPK

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan pengukuran berdasarkan Opini BPK atas LKPD yang telah diaudit selama 3 tahun terakhir berturut-turut.

Berdasarkan Permendagri Nomor Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka proses perhitungan IPKD disajikan secara lengkap dalam lampiran LKJIP BPKAD Tahun 2024.

- a. Bobot Dimensi 1 IPKD sebesar 20, dan hasil perhitungan Skor rerata Dimensi 1 sebesar 0,734 (dengan kertas kerja terlampir). Maka perhitungan Skor Dimensi 1 IPKD sebagai berikut:
Indeks Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran:

$$= \text{Skor Rerata} \times \text{Bobot}$$

$$= 0,374 \times 20$$

$$= 14,6800$$
- b. Bobot Dimensi 2 IPKD sebesar 20, dan hasil perhitungan Skor rerata Dimensi 2 sebesar 1 (dengan kertas kerja terlampir). Maka perhitungan Skor Dimensi 3 IPKD sebagai berikut:
Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD:

$$= \text{Skor Rerata} \times \text{Bobot}$$

$$= 1 \times 20$$

$$= 20,0000$$
- c. Bobot Dimensi 3 IPKD sebesar 15, dan hasil perhitungan Skor rerata Dimensi 3 sebesar 0,5 (dengan kertas kerja terlampir). Maka perhitungan Skor Dimensi 3 IPKD sebagai berikut:
Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah:

$$= \text{Skor Rerata} \times \text{Bobot}$$

$$= 0,5 \times 15$$

$$= 7,5000$$
- d. Bobot Dimensi 4 IPKD sebesar 20, dan hasil perhitungan Skor rerata Dimensi 4 sebesar 0,75 (dengan kertas kerja terlampir). Maka perhitungan Skor Dimensi 4 IPKD sebagai berikut:
Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD

$$= \text{Skor Rerata} \times \text{Bobot}$$

$$= 0,75 \times 20$$

$$= 15,0000$$
- e. Bobot Dimensi 5 IPKD didapatkan dari perhitungan tahun n-1. Hal tersebut dikarenakan proses penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Blitar, maupun Pemerintah Daerah lainnya (sebagai variable perhitungan Dimensi 5 IPKD) sedang dalam proses.

Berdasarkan Surat dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.3/6145/BSKDN Tanggal 13 Desember 2024, maka didapatkan Hasil Penghitungan Dimensi 5 pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 (Tahun Ukur 2024) dengan Kategori Kemampuan Keuangan Daerah “Sedang”, maka Hasil Pengukuran Dimensi 5 IPKD Tahun 2023 sebesar 4,4180.

- f. Bobot Dimensi 6 IPKD (Opini BPK) sebesar 15, dan hasil perhitungan Skor Dimensi 6 sebesar 1 (dengan kertas kerja terlampir), sehingga formulasi perhitungan Skor adalah sebagai berikut:

Indeks Dimensi Opini BPK:

= Skor x Bobot

= 1 x 15

= 15,0000

Maka, berdasarkan perhitungan mandiri di atas, diperoleh Nilai IPKD Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagai berikut:

IPKD = Nilai (D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6)

= 14,6800 + 20,0000 + 7,5000 + 15,0000 + 4,4180 + 15,0000

= 76,5980

Selanjutnya perkembangan kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 s.d. 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.9
Perkembangan Kinerja
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun N (2024)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	71,4610	72,7080*)	76,5980

*) perhitungan mandiri

Capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra pada Tahun 2021-2026, dimana selanjutnya akan dilaksanakan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra.

Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun n	Persentase capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	73	76,5980	104,93

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/ Nasional maka capaian ini dalam kategori sedang/ (B) perlu perbaikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 13 Desember 2024 Nomor: 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran IPKD TA 2023 Tahun Ukur 2024, maka Kabupaten Blitar masuk dalam klaster Derajat Kemandirian Fiskal Daerah Sedang dengan nilai 72,708 (peringkat ke 57 dari 84 kabupaten/ kota dengan klaster derajat fiskal daerah sedang).

Hal tersebut menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Blitar perlu melaksanakan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dari berbagai dimensi. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/ Nasional. Perbandingan tersebut dilakukan dengan membandingkan Nilai IPKD Kabupaten Blitar, dengan nilai IPKD Provinsi Jawa Timur, maupun IPKD Kabupaten/ Kota klaster derajat fiskal daerah sedang, sebagai berikut:

Tabel 3.11

Perbandingan Capaian Kinerja di Tingkat Provinsi Jawa Timur/ Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi/ Nasional Tahun 2024	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	76,5980/ B *)	82,212/ B	Prov. Jatim
				84,102/ A	Muna Barat
				44,363/C	Biak Numfor (Papua)

Untuk mencapai target kinerja di atas, pada Tahun 2024 BPKAD Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Penguatan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, khususnya konsistensi pagu anggaran antara RKPD-KUA PPAS- APBD. Hal tersebut dikarenakan tingkat konsistensi penganggaran antar program dalam dokumen-dokumen tersebut masih lemah;
2. Optimalisasi penganggaran belanja dalam APBD sesuai dengan tugas mandatory pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui pengendalian besaran belanja pegawai dan bidang infrastruktur;
3. Peningkatan transparansi keuangan daerah dengan meningkatkan keteraksesan masyarakat terhadap informasi keuangan daerah;
4. Pengendalian yang efektif terhadap proses penyerapan anggaran secara tepat waktu;

5. Penguatan kondisi keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah secara berkala; dan
6. Efektivitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan penyajian data keuangan yang akuntabel.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan: koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam pemanfaatan IPKD sebagai instrumen dalam pengambilan keputusan dalam keuangan daerah.

Realisasi kinerja di atas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/ kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar Rp. 402.414.242.714,00 dengan realisasi sebesar Rp. 399.287.051.212,00 (99,22%). Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	107,88%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	402.414.242.714	399.287.051.212	99,22
			Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.002.143.385	1.966.547.165	98,22
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	117.502.760	117.493.400	99,99
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	111.712.760	111.521.400	99,83

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	30.704.000	30.704.000	100,00
			Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	9.562.500	9.562.500	100,00
			Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	18.315.336	18.310.000	99,97
			Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	103.864.688	100.450.513	96,71
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	990.620.837	975.280.802	98,45
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	400.480.340	385.220.620	96,19
			Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	89.660.000	88.616.430	98,84
			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	246.393.808	245.456.150	99,62
			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	148.035.500	147.697.500	99,77
			Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas, SPD	12.034.620	12.032.000	99,98
			Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimb dan Dana Transfer Lainnya	30.261.500	30.138.800	99,59
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan	37.253.138	36.878.100	98,99

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Fihak Ketiga (PFK)			
			Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2.605.276	2.600.000	99,80
			Sub Keg Penyusunan Juknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan Pertanggung jawaban Sub Keg	2.829.832	2.827.000	99,90
			Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	13.373.942	13.282.750	99,32
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	420.168.700	390.633.627	92,97
			Sub Kegiatan Koord Pelaks. Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	29.536.225	28.323.327	95,89
			Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	16.581.000	16.259.500	98,06
			Sub Kegiatan Konsolidasi Lap Keu SKPD, BLUD dan Lap Keu Pemda	64.718.500	64.612.600	99,84
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Peny Ranc Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Ranc Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	124.952.622	119.490.500	95,63
			Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	19.120.000	13.991.000	73,17

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pelaksanaan APBD			
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	39.435.000	28.048.500	71,13
			Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	41.315.000	40.350.000	97,66
			Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	60.009.678	55.398.200	92,32
			Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	24.500.675	24.160.000	98,61
			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	399.893.572.321	396.832.111.770	99,23
			Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	382.087.488.000	382.087.488.000	100,00
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.931.931.548	5.042.146.523	85,01
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	11.874.152.773	9.702.477.247	81,71
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.340.753.222	2.194.591.113	93,76
			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.340.753.222	2.194.591.113	93,76
			Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	105.301.500	104.889.200	99,61
			Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	88.163.700	87.724.866	99,50
			Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1.332.000	1.276.500	95,83
			Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	59.133.960	4.824.000	8,16

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	244.012.100	239.511.947	98,16
			Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	1.624.286.570	1.558.574.600	95,95
			Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	151.368.000	142.686.000	94,26
			Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	67.155.392	55.104.000	82,05
			Tingkat efisiensi			8,66%

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan di atas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 107,88% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 99,22%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nilai efisiensi sebesar 8,66%.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas ASN terkait dengan Implementasi IPKD melalui FGD/ Bimtek/ Sosialisasi/ Seminar/ Lokakarya;
2. Koordinasi dan Konsultasi dengan pengampu IPKD pada Badan Strategi Kebijakan Kemendagri RI dan BRIDA Provinsi Jawa Timur, serta pemda lain yang memiliki *bestpractice* IPKD kategori A (Baik)

- dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berbasis IPKD;
3. Peningkatan PAD melalui pemanfaatan aset daerah/ BMD dalam rangka meningkatkan aspek kemandirian fiskal daerah, yang dapat menunjang kondisi keuangan daerah/ kapasitas fiskal yang lebih besar;
 4. Melaksanakan koordinasi/ pemantauan dan pengendalian secara berkala terhadap proses penganggaran, penyerapan, dan pelaporan keuangan daerah

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

Dalam sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 107,88%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah.

Tabel 3.13
Realisasi Kinerja
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	87%	98,13%	112,79%
Capaian Kinerja					112,79%

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu membandingkan tingkat kesesuaian nilai aset dalam 2 (dua) dokumen Neraca BMD dan Neraca Keuangan Pemerintah Daerah.

Tahapan pertama dilaksanakan evaluasi/ penilaian mandiri oleh tim evaluator SAKIP BPKAD Kabupaten Blitar, pada Bulan Januari s.d. Februari 2025 dengan menggunakan data keuangan daerah/ LKPD bersifat sementara. Hal tersebut dikarenakan Necaca dalam LKPD belum diaudit oleh BPK RI. Berdasarkan tabel 3.3 diatas, indikator IPKD dapat direalisasi sebesar 76,598 dari target 71, sehingga dihasilkan capaian kinerja sebesar 107,88%.

Pengukuran Sasaran Strategis 3 dilaksanakan dengan mengukur Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah dengan data sebagai berikut:

Aset	Nilai Aset Tetap Neraca BMD	Nilai Aset Tetap dalam Neraca LKPD
Tanah	944.518.523.195,02	744.795.125.159,77
Peralatan dan Mesin	745.484.702.072,37	1.089.675.485.781,41
Gedung dan Bangunan	1.591.679.754.991,05	1.590.238.455.667,59
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.089.118.625.111,48	4.089.296.735.911,48
Aset Tetap Lainnya	54.308.364.841,25	52.661.517.311,71
Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.710.217.431,62	10.734.067.431,62
JUMLAH ASET TETAP	7.435.820.187.642,79	7.577.401.387.263,58

Formulasi perhitungan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Nilai Aset Tetap Neraca BMD} : \text{Nilai Aset Tetap Neraca Keuda}) \times 100\% \\
 &= (\text{Rp. } 7.435.820.187.642,79 : \text{Rp } 7.577.401.387.263,58) \times 100\% \\
 &= 98,13\%
 \end{aligned}$$

Maka, capaian IKU 3 BPKAD Kab. Blitar Tahun 2023 sebagai berikut:

$$= (\text{Capaian} : \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (98,13 : 87) \times 100\%$$

$$=112,79\%$$

Analisa Capaian:

Berikut disajikan tabel perbandingan target, realisasi, capaian pada tahun 2021 s.d. 2024.

	2021	2022	2023	2024*
Target	84%	85 %	86%	87%
Realisasi	91.92%	96,96%	97,80%	98,13%
Capaian	109,43%	115,82%	113,72%	112,79 %

Dari tabel di atas peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah yang diukur dengan tingkat kesesuaian antara nilai BMD pada Neraca Aset dengan Nilai BMD pada Neraca Keuangan, mengalami peningkatan. Secara berturut-turut, realisasinya meningkat dari 91,92% (2021) menjadi 96,96% (2022) hingga 98,13% (2024). Demikian juga capaiannya meningkat dari 109,43 menjadi 112,79 pada tahun 2024. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah tingkat konsistensi pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan. Proses penilaian kembali atas BMD menjadi fundamen dalam menyajikan nilai Aset secara akuntabel. Selain itu proses inventarisasi dan penghapusan aset juga membantu pemda dalam menyesuaikan nilai aset secara existing. Sebagai langkah preventif, maka yang dilakukan adalah menyusun standar harga dan standar kebutuhan BMD untuk mencegah tingkat kesalahan maupun penyimpangan pengelolaan BMD. Penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya adalah penguatan fungsi perencanaan dan penatausahaan BMD agar pemanfaatan BMD dapat memberikan kontribusi pada peningkatan PAD.

Selanjutnya perkembangan kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2022 s.d. 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.14
Perkembangan Kinerja
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun N (2024)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	96,96	97,80	98,13

*) perhitungan mandiri

Capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra pada Tahun 2021-2026, dimana selanjutnya akan dilaksanakan Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra.

Tabel 3.15
Pencapaian Kinerja
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun n	Persentase capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	89	98,13	110,26

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/ Nasional maka capaian ini mendekati capaian IKU Bidang Pengelolaan Aset BPKAD Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan LKjIP BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, nilai keselarasan aset daerah mencapai 100%. Indikator tersebut memiliki persamaan dengan IKU BPKAD Kabupaten Blitar, yang pada tahun 2024 terealisasi sebesar 98,13.

Hal tersebut menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Blitar perlu melaksanakan optimalisasi pengelolaan aset daerah, dari berbagai dimensi, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pencatatan dan penilaian aset, pengamanan dan penghapusan aset. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/ Nasional. dan Kabupaten Blitar:

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja di Tingkat Provinsi Jawa Timur/ Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi/ Nasional Tahun 2024	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	98,13	100,00	BPKAD Prov. Jatim

Untuk mencapai target kinerja di atas, pada Tahun 2024 BPKAD Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Penguatan Kesesuaian Dokumen RKBMD dan RKPBM SKPD dengan perencanaan dan realisasi belanja modal pada RKA/RKAP/DPA/DPPA SKPD;
2. Optimalisasi penyusunan dan pemanfaatan Standar Harga dalam penyusunan dokumen perencanaan;
3. Optimalisasi pencatatan, penilaian, BMD melalui supervisi/ pendampingan/ pembinaan kepada masing-masing SKPD;
4. Percepatan keselarasan pencatatan aset daerah melalui fasilitasi penyelesaian permasalahan aset daerah, dengan para pemangku kepentingan;
5. Optimalisasi pemanfaatan aset untuk peningkatan PAD dan kemandirian keuangan daerah;

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat belum sepenuhnya teratasi sehingga tingkat keselarasan/ kesesuaian nilai aset belum mencapai 100%. Kendala dan hambatan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah terkait dengan: penyelesaian permasalahan aset daerah.

Realisasi kinerja di atas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/ kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah adalah sebesar Rp. 1.620.882.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.584.559.944,00 (97,76%). Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah:

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	97,80%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.620.882.400	1.584.559.944	97,76
			Kegiatan Pengelolaan BMD	1.620.882.400	1.584.559.944	97,76
			Sub.Keg. Penyusunan Standar Harga	104.577.800	89.567.720	85,65
			Sub.Keg. Penatausahaan BMD	116.607.000	115.402.700	98,97
			Sub.Keg. Pengamanan BMD	2.751.000	2.634.000	95,75
			Sub.Keg. Penilaian BMD	20.768.000	20.043.000	96,51
			Sub.Keg. Optimal.Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan tanganan, Pemusnahan, Penghapusan BMD	147.644.700	147.045.606	99,59
			Sub. Keg. Pengamanan BMD	1.030.233.900	1.023.844.105	99,38
			Sub. Keg. Penilaian BMD	150.000.000	149.878.950	99,92
			Sub. Keg. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan tanganan, Pemusnahan, Penghapusan BMD	25.500.000	13.844.611	54,29
			Sub. Keg. Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMD	22.500.000	21.999.252	97,77
			Sub. Keg. Penyusunan Laporan BMD	300.000	300.000	100,00
			Tingkat efisiensi			10,12%

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan di atas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah, Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 112,79% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 98,13%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nilai efisiensi sebesar 10,12%.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas ASN terkait dengan Pengelolaan BMD melalui FGD/ Bimtek/ Sosialisasi/ Seminar/ Lokakarya;
2. Koordinasi dan Konsultasi dengan pemangku kepentingan pada BPKAD Provinsi Jawa Timur, serta BPKAD pemda lain yang memiliki *bestpractice* pengelolaan BMD berbasis IT;
3. Peningkatan PAD melalui pemanfaatan aset daerah/ BMD dalam rangka meningkatkan aspek kemandirian fiskal daerah, yang dapat menunjang kondisi keuangan daerah/ kapasitas fiskal yang lebih besar;
4. Melaksanakan koordinasi/ pemantauan dan pengendalian secara berkala terhadap pengelolaan aset daerah, khususnya penyelesaian permasalahan aset daerah.

C. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran BPKAD Kabupaten Blitar untuk Tahun Anggaran 2024 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan didiskripsikan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Alokasi per Sasaran Pembangunan
BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE ANGGARAN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai dan Predikat SAKIP PD	12.689.483.372	3,04
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuda	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	402.414.242.714	96,40
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	2.340.753.222	0,56

Dari tabel di atas maka dapat didiskripsikan bahwa 96,40% dari total anggaran dialokasikan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan dan penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, dan pelaporan keuangan daerah, yang pada akhirnya mendukung capaian terhadap Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Alokasi anggaran sebesar 0,56% dari total anggaran dialokasikan untuk pengelolaan aset daerah. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah didukung dengan alokasi anggaran sebesar 3,04%. penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya meminimalisasi belanja pegawai, mengefektifkan belanja bidang pengelolaan keuangan dan penguatan belanja pengelolaan aset daerah, sesuai dengan isu-isu strategis yang berkembang.

Dalam rangka mengukur efisiensi kinerja dan anggaran, maka BPKAD Kabupaten Blitar melakukan pengukuran melalui perbandingan Tabel 3.13

Tabel 3.13
Realisasi Kinerja dan Keuangan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Targ et	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	80/A	73/BB	91,25%	12.689.483.372	11.112.072.008	87,57
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	71	76,598	107,88%	402.414.242.714	399.287.051.212	99,22
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	87	97,80	112,79%	1.620.882.400	1.584.559.944	97,76

Realisasi anggaran tertinggi sebesar 99,22% terdapat pada dukungan capaian Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuda sebesar 107,88%. Realisasi anggaran terendah sebesar 87,57% terdapat pada dukungan capaian 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD. Dengan capaian kinerja tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas realisasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja. Penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya adalah tetap menerapkan *money follow program*, dimana penguatan anggaran dalam pengelolaan aset perlu dioptimalkan guna mendukung proses sertifikasi jalan lingkungan, sebagaimana rekomendasi dari MCP KPK.

Selanjutnya tingkat efisiensi penggunaan sumber daya juga dapat diukur dan dianalisa dalam tabel 3.14 Sebagai berikut:

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
BPKAD Kabupaten Blitar tahun 2024

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA %	PENYERAPAN ANGGARAN %	TINGKAT EFISIENSI %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai dan Predikat SAKIP PD	91,25	87,57	3,68
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	107,88	99,22	8,66
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tk.Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	112,79	97,76	10,12

Analisa:

Tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang paling efektif terdapat pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah dengan capaian kinerja 112,79% dan penyerapan anggaran 97,76%, sehingga tingkat efisiensinya mencapai 10,12%. Hal tersebut dikarenakan proses pengamanan aset berupa kegiatan sertifikasi tanah berjalan efektif.

Tingkat efisiensi pada Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD dengan capaian kinerja 91,25% dan penyerapan anggaran 87,57%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 3,68%. Hal tersebut dikarenakan proses belanja barang dan jasa serta barang modal berjalan sesuai dengan ketentuan. Belanja pegawai dapat dikurangi terkait frekuensi dan kuantitas kegiatan koordinasi/perjalanan dinas dan makanan dan minuman.

Tingkat efisiensi pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dengan capaian kinerja 107,88% dan penyerapan anggaran 99,22%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 8,66%. Hal tersebut dikarenakan proses pencairan/ realisasi dana transfer berjalan secara optimal sesuai ketentuan. Demikian juga penyerapan anggaran pada masing-masing bidang. Hal tersebut menunjukkan tingkat perencanaan dan penganggaran berjalan efektif.

Penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, adalah dengan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran strategis merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan kelembagaan dalam meningkatkan *performance*-nya. Semakin besar tingkat efisiensinya maka *performance* suatu perangkat daerah akan semakin baik, demikian sebaliknya semakin rendah/ kecil tingkat efisiensinya, maka perangkat daerah tersebut perlu dievaluasi baik tata kerjanya maupun SDM nya. Tabel 3.14 di atas, mendiskripsikan bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya secara optimal telah tercapai pada masing-masing sasaran strategis.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dalam rangka mendukung Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (*Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur*), BPKAD Kabupaten Blitar sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan, berusaha meningkatkan kinerjanya, dengan melaksanakan perencanaan yang terukur. Selanjutnya BPKAD Kabupaten Blitar melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara yang berkesinambungan, hingga pada akhirnya melaksanakan pengendalian/ evaluasi kinerja secara menyeluruh. Dalam menjalankan tupoksinya, BPKAD Kabupaten Blitar berupaya untuk memberikan nilai tambah/ nilai positif, yang dapat mendukung upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Blitar 2021-2026, BPKAD Kabupaten Blitar memiliki peran serta dalam mewujudkan misi ke-3, yaitu Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas. Hal tersebut bertujuan untuk menjawab isu strategis: (1) tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi, (2) tuntutan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik, dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Dengan sasaran strategis Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas, serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Blitar sebagai upaya untuk menjawab isu- isu strategis tersebut, antara lain:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Secara umum pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut mengacu pada Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara umum pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

Secara umum pengukuran IKU tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tahun 2024 BPKAD Kabupaten Blitar terus berupaya secara optimal dalam mengimplementasikan proses bisnis perencanaan penganggaran, peningkatan pelayanan verifikasi pencairan anggaran yang tepat waktu, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Di bidang keuangan, BPKAD berupaya melakukan pengelolaan keuangan daerah berbasis TI/ aplikasi SIPD dan FMIS. Di bidang pengelolaan aset daerah, BPKAD Kabupaten Blitar terus berupaya untuk memenuhi Renaksi MCP KPK dan Tindak Lanjut Temuan BPK dengan melaksanakan pencatatan aset yang akuntabel, pemanfaatan aset yang efektif, dan pengamanan aset (sertifikasi tanah dan tanah di bawah jalan kabupaten), penilaian aset daerah yang telah dilaksanakan secara bertahap. Hal ini menunjukkan sinyal positif peningkatan kinerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 sebagaimana didiskripsikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2024.

Dalam tata kelola keuangan perangkat daerah, BPKAD Kabupaten Blitar terus berupaya meningkatkan tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran daerah, realisasi pendapatan, realisasi penyerapan anggaran, dan pertanggungjawaban-pelaporan keuangan daerah secara optimal, dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah sesuai dengan *framework* Pengukuran Indeks Pengelolaan

Keuangan Daerah. Maka perlu didukung oleh budaya kerja organisasi yang mendukung terlaksananya indikator kinerja utama perangkat daerah.

Maka BPKAD Kabupaten Blitar perlu berkomitmen untuk terus belajar dan bertumbuh menjadi organisasi pembelajar (*learning organizational*) dengan memanfaatkan potensi yang ada, sebagai fudamen/ dasar yang kuat bagi keberhasilan kinerja BPKAD Kabupaten Blitar. LKjIP BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan diskripsi tentang capaian kinerja pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini juga sebagai perwujudan aspek transparansi dan akuntabilitas BPKAD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, untuk berperan serta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Blitar.

B. Rencana Tindak Lanjut

Di masa mendatang, perkembangan kehidupan masyarakat berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan, seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa tingkat kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik akan semakin meningkat. BPKAD Kabupaten Blitar berperan aktif melaksanakan tugas penunjang Pemerintah Kabupaten Blitar di bidang keuangan.

Dengan memperhatikan perihal di atas, maka rencana tindak lanjut BPKAD Kabupaten Blitar yang dapat dilaksanakan ke depan adalah:

1. Secara internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/ diklat, seminar, *workshop*, *in house training*).

2. Secara kelembagaan, meningkatkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan skala prioritas pada program/ kegiatan/ sub kegiatan, dengan mengacu pada (1) Visi Misi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; (2) Isu-isu strategis yang berkembang, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan (3) Implementasi Peraturan baru dan reviu implementasi perundang-undangan yang berlaku.
3. Secara eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan), BUMN (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT. Taspen), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (BPKAD Prov. Jatim), dan perangkat daerah terkait di lingkup Kabupaten Blitar, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Blitar.
4. Tindak Lanjut atas Rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 Nomor: R/700/704/409.9.4/2024 tanggal 9 Juli 2024, antara lain:
 - a. Perencanaan Kinerja, mendokumentasikan hasil analisis kegiatan dan anggaran dalam mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. Pengukuran Kinerja, (1) Melakukan pengukuran kinerja secara berkala berkala dan berjenjang, (2) Berkoordinasi dengan Tim SAKIP Kabupaten Blitar sesuai kewenangannya terkait aplikasi SIYAKIN dalam rangka pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja, (3) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja, (1) Menyusun laporan kinerja tribulanan dan menyampaikan kepada Bupati, (2) Menyusun LKjIP sesuai dengan sistematika dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021; (3) Menyajikan informasi perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi dan target

kinerja dengan target jangka menengah serta menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dalam dokumen LKjIP Bab III, (4) Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja untuk penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

- d. Akuntabilitas Kinerja Internal melalui kegiatan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat Kabupaten Blitar terkait aplikasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Keempat butir tersebut telah ditindaklanjuti melalui kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP yang telah didokumentasikan di dalam aplikasi e-Audit (<https://eaudit.blitarkab.go.id>)

Blitar, 17 Februari 2025

KEPALA BPKAD KAB. BLITAR

KURDIYANTO, SE., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19770422 200212 1 004

LAMPIRAN

KERTAS KERJA PERHITUNGAN MANDIRI INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024

Perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Blitar Tahun 2023 berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang IPKD, sebagai berikut:

**1. Perhitungan Skor/ Nilai Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran**

a. Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD

NO.	RPJMD	RKPD	SESUAI/ TIDAK SESUAI	SKOR/ NILAI
	URUSAN/ PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM		
1	2	3	4	5
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Pendidikan	Pendidikan		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Sesuai	1
3	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	Sesuai	1
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Sesuai	1
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Sesuai	1
	Kesehatan	Kesehatan		
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Sesuai	1
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sesuai	1
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Sesuai	1
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	Sesuai	1

	<i>Kesehatan</i>	<i>Kesehatan</i>		
	RSD Ngudi Waluyo			
11	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
12	<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	Sesuai	1
	RSD Srengat			
13	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
14	<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	Sesuai	1
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
15	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
16	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</i>	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</i>	Sesuai	1
17	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>	Sesuai	1
18	<i>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</i>	<i>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</i>	Sesuai	1
19	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</i>	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</i>	Sesuai	1
20	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</i>	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</i>	Sesuai	1
21	<i>Program Penataan Bangunan Gedung</i>	<i>Program Penataan Bangunan Gedung</i>	Sesuai	1
22	<i>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</i>	<i>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</i>	Sesuai	1
23	<i>Program Penyelenggaraan Jalan</i>	<i>Program Penyelenggaraan Jalan</i>	Sesuai	1
24	<i>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</i>	<i>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</i>	Sesuai	1
25	<i>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>	<i>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>	Sesuai	1
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
26	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
27	<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	Sesuai	1
28	<i>Program Kawasan Permukiman</i>	<i>Program Kawasan Permukiman</i>	Sesuai	1

29	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Sesuai	1
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
27	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Sesuai	1
28	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Sesuai	1
29	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Sesuai	1
	Sosial	Sosial		
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
31	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Sesuai	1
32	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Sesuai	1
33	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Sesuai	1
34	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Sesuai	1
35	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	Sesuai	1
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Tenaga Kerja	Tenaga Kerja		
36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
37	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Sesuai	1
38	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Sesuai	1
39	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Sesuai	1
40	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Sesuai	1
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
41	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1

42	<i>Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</i>	<i>Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</i>	Sesuai	1
43	<i>Program Perlindungan Perempuan</i>	<i>Program Perlindungan Perempuan</i>	Sesuai	1
44	<i>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</i>	<i>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</i>	Sesuai	1
45	<i>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</i>	<i>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</i>	Sesuai	1
46	<i>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</i>	<i>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</i>	Sesuai	1
47	<i>Program Perlindungan Khusus Anak</i>	<i>Program Perlindungan Khusus Anak</i>	Sesuai	1
	Pangan	Pangan		
48	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</i>	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</i>	Sesuai	1
49	<i>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>	<i>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>	Sesuai	1
50	<i>Program Penanganan Kerawanan Pangan</i>	<i>Program Penanganan Kerawanan Pangan</i>	Sesuai	1
51	<i>Program Pengawasan Keamanan Pangan</i>	<i>Program Pengawasan Keamanan Pangan</i>	Sesuai	1
	Pertanahan	Pertanahan		
52	<i>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	<i>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	Sesuai	1
53	<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</i>	<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</i>	Sesuai	1
	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup		
54	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
55	<i>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1
56	<i>Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1
57	<i>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</i>	<i>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</i>	Sesuai	1
58	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	Sesuai	1

59	<i>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	<i>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	Sesuai	1
60	<i>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	<i>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	Sesuai	1
61	<i>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1
62	<i>Program Pengelolaan Persampahan</i>	<i>Program Pengelolaan Persampahan</i>	Sesuai	1
	Administrasi Kependudukan dan Capil	Administrasi Kependudukan dan Capil		
63	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
64	<i>Program Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Program Pendaftaran Penduduk</i>	Sesuai	1
65	<i>Program Pencatatan Sipil</i>	<i>Program Pencatatan Sipil</i>	Sesuai	1
66	<i>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	Sesuai	1
67	<i>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</i>	<i>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</i>	Sesuai	1
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
68	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
69	<i>Program Penataan Desa</i>	<i>Program Penataan Desa</i>	Sesuai	1
70	<i>Program Peningkatan Kerjasama Desa</i>	<i>Program Peningkatan Kerjasama Desa</i>	Sesuai	1
71	<i>Program Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Program Administrasi Pemerintahan Desa</i>	Sesuai	1
72	<i>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</i>	<i>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat</i>	Sesuai	1
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
73	<i>Program Pengendalian Penduduk</i>	<i>Program Pengendalian Penduduk</i>	Sesuai	1
74	<i>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</i>	<i>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</i>	Sesuai	1
75	<i>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</i>	<i>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</i>	Sesuai	1

	Perhubungan	Perhubungan		
76	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
77	<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	Sesuai	1
78	<i>Program Pengelolaan Pelayaran</i>	<i>Program Pengelolaan Pelayaran</i>	Sesuai	1
	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika		
79	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
80	<i>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</i>	<i>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</i>	Sesuai	1
81	<i>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</i>	<i>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</i>	Sesuai	1
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
82	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
83	<i>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</i>	<i>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</i>	Sesuai	1
84	<i>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</i>	<i>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</i>	Sesuai	1
85	<i>Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi</i>	<i>Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi</i>	Sesuai	1
86	<i>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</i>	<i>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</i>	Sesuai	1
87	<i>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</i>	<i>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</i>	Sesuai	1
88	<i>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</i>	<i>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</i>	Sesuai	1
89	<i>Program Pengembangan UMKM</i>	<i>Program Pengembangan UMKM</i>	Sesuai	1
	Penanaman Modal	Penanaman Modal		
90	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
91	<i>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	<i>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
92	<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>	<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
93	<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
94	<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Sesuai	1

95	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Sesuai	1
	Kepemudaan Olah Raga	Kepemudaan Olah Raga		
96	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Sesuai	1
97	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Sesuai	1
98	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Sesuai	1
	Statistik	Statistik		
99	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Sesuai	1
	Persandian	Persandian		
100	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Sesuai	1
	Kebudayaan	Kebudayaan		
101	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Sesuai	1
102	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Sesuai	1
103	Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	Sesuai	1
104	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Sesuai	1
105	Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	Sesuai	1
	Perpustakaan	Perpustakaan		
106	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
107	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Sesuai	1
	Kearsipan	Kearsipan		
108	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Sesuai	1
109	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Sesuai	1
110	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Sesuai	1
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan		
111	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Sesuai	1
112	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Sesuai	1
113	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Sesuai	1

114	<i>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</i>	<i>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</i>	Sesuai	1
	Pariwisata	Pariwisata		
115	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
116	<i>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</i>	<i>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</i>	Sesuai	1
117	<i>Program Pemasaran Pariwisata</i>	<i>Program Pemasaran Pariwisata</i>	Sesuai	1
118	<i>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i>	<i>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i>	Sesuai	1
119	<i>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</i>	Sesuai	1
	Pertanian	Pertanian		
120	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Sesuai	1
121	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>	Sesuai	1
122	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	Sesuai	1
123	<i>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	<i>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	Sesuai	1
124	<i>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</i>	<i>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</i>	Sesuai	1
125	<i>Program Perizinan Usaha Pertanian</i>	<i>Program Perizinan Usaha Pertanian</i>	Sesuai	1
126	<i>Program Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Program Penyuluhan Pertanian</i>	Sesuai	1
	Perdagangan	Perdagangan		
127	<i>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</i>	<i>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</i>	Sesuai	1
128	<i>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Sesuai	1
129	<i>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</i>	<i>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</i>	Sesuai	1
130	<i>Program Pengembangan Ekspor</i>	<i>Program Pengembangan Ekspor</i>	Sesuai	1
131	<i>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</i>	<i>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</i>	Sesuai	1

132	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Sesuai	1
	Perindustrian	Perindustrian		
133	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
134	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Sesuai	1
135	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Sesuai	1
136	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Sesuai	1
	Transmigrasi	Transmigrasi		
137	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Sesuai	1
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
	Sekreatriat Daerah	Sekreatriat Daerah		
138	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
139	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sesuai	1
140	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sesuai	1
	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD		
141	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
142	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sesuai	1
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	Perencanaan	Perencanaan		
143	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
144	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sesuai	1
145	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sesuai	1
	Keuangan	Keuangan		
146	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
147	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Sesuai	1

148	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sesuai	1
149	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Sesuai	1
	Kepegawaian	Kepegawaian		
150	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
151	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Sesuai	1
	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan		
152	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sesuai	1
	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan		
153	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Sesuai	1
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
	Inspektorat	Inspektorat		
154	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
155	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Sesuai	1
156	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Sesuai	1
G	UNSUR KEWILAYAHAN	UNSUR KEWILAYAHAN		
	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)		
157	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
158	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Sesuai	1
159	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Sesuai	1
160	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Sesuai	1
161	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Sesuai	1
162	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sesuai	1
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik		

163	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
164	<i>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</i>	Sesuai	1
165	<i>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</i>	<i>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</i>	Sesuai	1
166	<i>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Sesuai	1
167	<i>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</i>	<i>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</i>	Sesuai	1
168	<i>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</i>	Sesuai	1
TOTAL SKOR/ NILAI				168

Jumlah Sesuai : 168

Jumlah Tidak Sesuai : 0

Jumlah Program : 168

Skor/ Nilai = Jumlah Skor Kesesuaian / Jumlah Program
 = 168 / 168
 = 1

b. Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA PPAS

NO.	RKPD	KUA PPAS	SESUAI/ TIDAK SESUAI	SKOR/ NILAI
	URUSAN/ PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM		
1	2	3	4	5
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Pendidikan	Pendidikan		
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
2	<i>Program Pengelolaan Pendidikan</i>	<i>Program Pengelolaan Pendidikan</i>	Sesuai	1

NO	RKPD	KUA PPAS	SESUAI/ TIDAK SESUAI	SKOR/NILAI
	URUSAN/PROGRAM	URUSAN/PROGRAM		
1	2	3	4	5
3	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	Sesuai	1
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Sesuai	1
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Sesuai	1
	Kesehatan	Kesehatan		
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Sesuai	1
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sesuai	1
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Sesuai	1
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sesuai	1
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Sesuai	1
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Sesuai	1
14	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Sesuai	1
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sesuai	1

16	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Sesuai	1
17	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Sesuai	1
18	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Sesuai	1
19	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Sesuai	1
20	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Sesuai	1
21	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Sesuai	1
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
23	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Sesuai	1
24	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Sesuai	1
25	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Sesuai	1
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
27	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Sesuai	1
28	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Sesuai	1
29	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Sesuai	1
	Sosial	Sosial		
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1

31	<i>Program Pemberdayaan Sosial</i>	<i>Program Pemberdayaan Sosial</i>	Sesuai	1
32	<i>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</i>	<i>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</i>	Sesuai	1
33	<i>Program Rehabilitasi Sosial</i>	<i>Program Rehabilitasi Sosial</i>	Sesuai	1
34	<i>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</i>	<i>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</i>	Sesuai	1
35	<i>Program Penanganan Bencana</i>	<i>Program Penanganan Bencana</i>	Sesuai	1
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Tenaga Kerja	Tenaga Kerja		
36	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
37	<i>Program Perencanaan Tenaga Kerja</i>	<i>Program Perencanaan Tenaga Kerja</i>	Sesuai	1
38	<i>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>	<i>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>	Sesuai	1
39	<i>Program Penempatan Tenaga Kerja</i>	<i>Program Penempatan Tenaga Kerja</i>	Sesuai	1
40	<i>Program Hubungan Industrial</i>	<i>Program Hubungan Industrial</i>	Sesuai	1
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
41	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
42	<i>Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</i>	<i>Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</i>	Sesuai	1
43	<i>Program Perlindungan Perempuan</i>	<i>Program Perlindungan Perempuan</i>	Sesuai	1
44	<i>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</i>	<i>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</i>	Sesuai	1
45	<i>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</i>	<i>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</i>	Sesuai	1
46	<i>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</i>	<i>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</i>	Sesuai	1
47	<i>Program Perlindungan Khusus Anak</i>	<i>Program Perlindungan Khusus Anak</i>	Sesuai	1
	Pangan	Pangan		

48	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</i>	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</i>	Sesuai	1
49	<i>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>	<i>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>	Sesuai	1
50	<i>Program Penanganan Kerawanan Pangan</i>	<i>Program Penanganan Kerawanan Pangan</i>	Sesuai	1
51	<i>Program Pengawasan Keamanan Pangan</i>	<i>Program Pengawasan Keamanan Pangan</i>	Sesuai	1
	Pertanahan	Pertanahan		
52	<i>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	<i>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	Sesuai	1
53	<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</i>	<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</i>	Sesuai	1
	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup		
54	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
55	<i>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1
56	<i>Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1
57	<i>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</i>	<i>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</i>	Sesuai	1
58	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	Sesuai	1
59	<i>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	<i>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	Sesuai	1
60	<i>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	<i>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	Sesuai	1
61	<i>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1
62	<i>Program Pengelolaan Persampahan</i>	<i>Program Pengelolaan Persampahan</i>	Sesuai	1

	Administrasi Kependudukan dan Capil	Administrasi Kependudukan dan Capil		
63	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
64	<i>Program Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Program Pendaftaran Penduduk</i>	Sesuai	1
65	<i>Program Pencatatan Sipil</i>	<i>Program Pencatatan Sipil</i>	Sesuai	1
66	<i>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	Sesuai	1
67	<i>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</i>	<i>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</i>	Sesuai	1
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
68	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
69	<i>Program Penataan Desa</i>	<i>Program Penataan Desa</i>	Sesuai	1
70	<i>Program Peningkatan Kerjasama Desa</i>	<i>Program Peningkatan Kerjasama Desa</i>	Sesuai	1
71	<i>Program Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Program Administrasi Pemerintahan Desa</i>	Sesuai	1
72	<i>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</i>	<i>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat</i>	Sesuai	1
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
73	<i>Program Pengendalian Penduduk</i>	<i>Program Pengendalian Penduduk</i>	Sesuai	1
74	<i>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</i>	<i>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</i>	Sesuai	1
75	<i>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</i>	<i>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</i>	Sesuai	1
	Perhubungan	Perhubungan		
76	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
77	<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	Sesuai	1

78	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran	Sesuai	1
	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika		
79	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
80	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Sesuai	1
81	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Sesuai	1
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
82	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
83	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Sesuai	1
84	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Sesuai	1
85	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Sesuai	1
86	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Sesuai	1
87	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Sesuai	1
88	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Sesuai	1
89	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Sesuai	1
	Penanaman Modal	Penanaman Modal		
90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
91	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Sesuai	1
92	Program Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Sesuai	1
93	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Sesuai	1
94	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Sesuai	1

95	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Sesuai	1
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kepemudaan dan Olah Raga		
96	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Sesuai	1
97	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Sesuai	1
98	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Sesuai	1
	Statistik	Statistik		
99	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Sesuai	1
	Persandian	Persandian		
100	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Sesuai	1
	Kebudayaan	Kebudayaan		
101	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Sesuai	1
102	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Sesuai	1
103	Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	Sesuai	1
104	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Sesuai	1
105	Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	Sesuai	1
	Perpustakaan	Perpustakaan		
106	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
107	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Sesuai	1
	Kearsipan	Kearsipan		
108	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Sesuai	1

109	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Sesuai	1
110	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Sesuai	1
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan		
111	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Sesuai	1
112	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Sesuai	1
113	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Sesuai	1
114	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Sesuai	1
	Pariwisata	Pariwisata		
115	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
116	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Sesuai	1
117	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Sesuai	1
118	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Sesuai	1
119	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Sesuai	1
	Pertanian	Pertanian		
120	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sesuai	1
121	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Sesuai	1
122	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Sesuai	1
123	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sesuai	1

124	<i>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</i>	<i>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</i>	Sesuai	1
125	<i>Program Perizinan Usaha Pertanian</i>	<i>Program Perizinan Usaha Pertanian</i>	Sesuai	1
126	<i>Program Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Program Penyuluhan Pertanian</i>	Sesuai	1
	Perdagangan	Perdagangan		
127	<i>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</i>	<i>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</i>	Sesuai	1
128	<i>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Sesuai	1
129	<i>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</i>	<i>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</i>	Sesuai	1
130	<i>Program Pengembangan Ekspor</i>	<i>Program Pengembangan Ekspor</i>	Sesuai	1
131	<i>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</i>	<i>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</i>	Sesuai	1
132	<i>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</i>	<i>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</i>	Sesuai	1
	Perindustrian	Perindustrian		
133	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
134	<i>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</i>	<i>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</i>	Sesuai	1
135	<i>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</i>	<i>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</i>	Sesuai	1
136	<i>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</i>	<i>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</i>	Sesuai	1
	Transmigrasi	Transmigrasi		
137	<i>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</i>	<i>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</i>	Sesuai	1
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah		
138	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
139	<i>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</i>	<i>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</i>	Sesuai	1

140	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sesuai	1
	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD		
141	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
142	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sesuai	1
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	Perencanaan	Perencanaan		
143	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
144	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sesuai	1
145	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sesuai	1
	Keuangan	Keuangan		
146	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
147	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Sesuai	1
148	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sesuai	1
149	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Sesuai	1
	Kepegawaian	Kepegawaian		
150	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
151	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Sesuai	1
	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan		
152	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sesuai	1
	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan		
153	Prog Litbangda	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Sesuai	1

F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
	Inspektorat	Inspektorat		
154	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
155	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Sesuai	1
156	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Sesuai	1
G	UNSUR KEWILAYAHAN	UNSUR KEWILAYAHAN		
	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)		
157	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
158	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Sesuai	1
159	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Sesuai	1
160	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Sesuai	1
161	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Sesuai	1
162	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sesuai	1
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik		
163	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
164	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Sesuai	1
165	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Sesuai	1

	<i>Serta Budaya Politik</i>			
166	<i>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Sesuai	1
167	<i>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</i>	<i>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</i>	Sesuai	1
168	<i>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</i>	Sesuai	1
TOTAL SKOR/ NILAI				168

Jumlah Sesuai : 168

Jumlah Tidak Sesuai : 0

Jumlah Program : 168

Skor/ Nilai = Jumlah Skor Kesesuaian / Jumlah Program
 = 168 / 168
 = 1

c. Kesesuaian Nomenklatur Program KUA PPAS dan APBD

NO.	KUA PPAS	APBD	SESUAI/ TIDAK SESUAI	SKOR/ NILAI
	URUSAN/ PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM		
1	2	3	4	5
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Pendidikan	Pendidikan		
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
2	<i>Program Pengelolaan Pendidikan</i>	<i>Program Pengelolaan Pendidikan</i>	Sesuai	1
3	<i>Program Pengembangan Kurikulum</i>	<i>Program Pengembangan Kurikulum</i>	Sesuai	1

4	<i>Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</i>	<i>Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</i>	Sesuai	1
5	<i>Program Pengendalian Perizinan Pendidikan</i>	<i>Program Pengendalian Perizinan Pendidikan</i>	Sesuai	1
	Kesehatan	Kesehatan		
6	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
7	<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	Sesuai	1
8	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	Sesuai	1
9	<i>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</i>	<i>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</i>	Sesuai	1
10	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</i>	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</i>	Sesuai	1
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
11	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
12	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</i>	<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</i>	Sesuai	1
13	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>	Sesuai	1
14	<i>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</i>	<i>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</i>	Sesuai	1
15	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</i>	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</i>	Sesuai	1
16	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</i>	<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</i>	Sesuai	1
17	<i>Program Penataan Bangunan Gedung</i>	<i>Program Penataan Bangunan Gedung</i>	Sesuai	1
18	<i>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</i>	<i>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</i>	Sesuai	1
19	<i>Prog Penyelenggaraan Jalan</i>	<i>Program Penyelenggaraan Jalan</i>	Sesuai	1

20	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Sesuai	1
21	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Sesuai	1
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
23	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Sesuai	1
24	Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Sesuai	1
25	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Sesuai	1
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
27	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Sesuai	1
28	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Sesuai	1
29	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Sesuai	1
	Sosial	Sosial		
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
31	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Sesuai	1
32	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Sesuai	1
33	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Sesuai	1
34	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Sesuai	1

35	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	Sesuai	1
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Tenaga Kerja	Tenaga Kerja		
36	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	Sesuai	1
37	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Sesuai	1
38	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Sesuai	1
39	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Sesuai	1
40	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Sesuai	1
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
41	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	Sesuai	1
42	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Sesuai	1
43	Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Sesuai	1
44	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Sesuai	1
45	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Sesuai	1
46	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Sesuai	1
47	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Sesuai	1
	Pangan	Pangan		
48	Program Pengelolaan SDE Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Sesuai	1
49	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Sesuai	1
50	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Sesuai	1
51	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Sesuai	1
	Pertanahan	Pertanahan		

52	<i>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	<i>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	Sesuai	1
53	<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</i>	<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</i>	Sesuai	1
	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup		
54	<i>Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
55	<i>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1
56	<i>Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1
57	<i>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</i>	<i>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</i>	Sesuai	1
58	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	Sesuai	1
59	<i>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	<i>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	Sesuai	1
60	<i>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	<i>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>	Sesuai	1
61	<i>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</i>	<i>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</i>	Sesuai	1
62	<i>Program Pengelolaan Persampahan</i>	<i>Program Pengelolaan Persampahan</i>	Sesuai	1
	Administrasi Kependudukan dan Capil	Administrasi Kependudukan dan Capil		
63	<i>Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
64	<i>Program Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Program Pendaftaran Penduduk</i>	Sesuai	1
65	<i>Program Pencatatan Sipil</i>	<i>Program Pencatatan Sipil</i>	Sesuai	1
66	<i>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	Sesuai	1

67	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Sesuai	1
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
68	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
69	Program Penataan Desa	Program Penataan Desa	Sesuai	1
70	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Sesuai	1
71	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Sesuai	1
72	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Sesuai	1
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
73	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Sesuai	1
74	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Sesuai	1
75	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Sesuai	1
	Perhubungan	Perhubungan		
76	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
77	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Sesuai	1
78	Program Pengelolaan Pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran	Sesuai	1
	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika		
79	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
80	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Sesuai	1
81	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Sesuai	1

	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
82	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
83	<i>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</i>	<i>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</i>	Sesuai	1
84	<i>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</i>	<i>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</i>	Sesuai	1
85	<i>Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi</i>	<i>Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi</i>	Sesuai	1
86	<i>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</i>	<i>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</i>	Sesuai	1
87	<i>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</i>	<i>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</i>	Sesuai	1
88	<i>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</i>	<i>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</i>	Sesuai	1
89	<i>Program Pengembangan UMKM</i>	<i>Program Pengembangan UMKM</i>	Sesuai	1
	Penanaman Modal	Penanaman Modal		
90	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
91	<i>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	<i>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
92	<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>	<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
93	<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
94	<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
95	<i>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	<i>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	Sesuai	1
	Kepemudaan dan Olah Raga	Kepemudaan dan Olah Raga		
96	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</i>	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</i>	Sesuai	1
97	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</i>	<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</i>	Sesuai	1

98	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Sesuai	1
	Statistik	Statistik		
99	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Sesuai	1
	Persandian	Persandian		
100	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Sesuai	1
	Kebudayaan	Kebudayaan		
101	Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Sesuai	1
102	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Sesuai	1
103	Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	Sesuai	1
104	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Sesuai	1
105	Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	Sesuai	1
	Perpustakaan	Perpustakaan		
106	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
107	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Sesuai	1
	Kearsipan	Kearsipan		
108	Program Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Sesuai	1
109	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Sesuai	1
110	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Sesuai	1
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan		
111	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Sesuai	1
112	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Sesuai	1
113	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Sesuai	1

114	<i>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</i>	<i>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</i>	Sesuai	1
	Pariwisata	Pariwisata		
115	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Sesuai	1
116	<i>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</i>	<i>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</i>	Sesuai	1
117	<i>Program Pemasaran Pariwisata</i>	<i>Program Pemasaran Pariwisata</i>	Sesuai	1
118	<i>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i>	<i>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i>	Sesuai	1
119	<i>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</i>	<i>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</i>	Sesuai	1
	Pertanian	Pertanian		
120	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Sesuai	1
121	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>	Sesuai	1
122	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	Sesuai	1
123	<i>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	<i>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	Sesuai	1
124	<i>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</i>	<i>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</i>	Sesuai	1
125	<i>Program Perizinan Usaha Pertanian</i>	<i>Program Perizinan Usaha Pertanian</i>	Sesuai	1
126	<i>Program Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Program Penyuluhan Pertanian</i>	Sesuai	1
	Perdagangan	Perdagangan		
127	<i>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</i>	<i>Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</i>	Sesuai	1
128	<i>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Sesuai	1
129	<i>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</i>	<i>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</i>	Sesuai	1

130	Program Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Sesuai	1
131	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Sesuai	1
132	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Sesuai	1
	Perindustrian	Perindustrian		
133	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
134	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Sesuai	1
135	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Sesuai	1
136	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Sesuai	1
	Transmigrasi	Transmigrasi		
137	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Sesuai	1
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
	Sekreatriat Daerah	Sekreatriat Daerah		
138	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
139	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sesuai	1
140	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sesuai	1
	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD		
141	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1
142	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sesuai	1
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	Perencanaan	Perencanaan		
143	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sesuai	1

144	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sesuai	1
145	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sesuai	1
	Keuangan	Keuangan		
146	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
147	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Sesuai	1
148	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sesuai	1
149	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Sesuai	1
	Kepegawaian	Kepegawaian		
150	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
151	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Sesuai	1
	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan		
152	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sesuai	1
	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan		
153	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Sesuai	1
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
	Inspektorat	Inspektorat		
154	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sesuai	1
155	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Sesuai	1
156	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Sesuai	1
G	UNSUR KEWILAYAHAN	UNSUR KEWILAYAHAN		

	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)		
157	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
158	<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</i>	<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</i>	Sesuai	1
159	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>	Sesuai	1
160	<i>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>	<i>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>	Sesuai	1
161	<i>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	<i>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	Sesuai	1
162	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Sesuai	1
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik		
163	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Sesuai	1
164	<i>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</i>	Sesuai	1
165	<i>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</i>	<i>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</i>	Sesuai	1
166	<i>Prog Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	Sesuai	1
167	<i>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</i>	<i>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</i>	Sesuai	1
168	<i>Prog Peningkatan Kewaspadaan Nasional Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</i>			
TOTAL SKOR/ NILAI				168

Jumlah Sesuai : 168

Jumlah Tidak Sesuai : 0

Jumlah Program : 168

Skor/ Nilai = Jumlah Skor Kesesuaian / Jumlah Program
 = 168 / 168
 = 1

d. Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA PPAS

	URUSAN	PAGU	URUSAN	PAGU	SESUAI/ TIDAK SESUAI	SKOR/ NILAI
	1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Pendidikan						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	704.083.626.239,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	673.387.661.316,00	Tidak Sesuai	0
	Program Pengelolaan Pendidikan	150.304.798.362,00	Program Pengelolaan Pendidikan	158.117.693.123,00	Tidak Sesuai	0
	Program Pengembangan Kurikulum	725.938.861,00	Program Pengembangan Kurikulum	836.308.766,00	Tidak Sesuai	0
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	14.136.641.000,00	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	12.811.490.800,00	Tidak Sesuai	0
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	78.632.000,00	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	21.120.000,00	Tidak Sesuai	0
Kesehatan						
	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	160.296.902.729,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	117.097.502.704,01	Tidak Sesuai	0
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya KesMas	83.589.380.315,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	67.109.337.919,99	Tidak Sesuai	0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.251.997.426,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.845.616.177,00	Tidak Sesuai	0
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	608.700.300,00	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	640.070.380,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.601.927.080,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	742.262.456,00	Tidak Sesuai	0
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.909.105.824,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.185.081.261,49	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	46.358.725.400,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	60.959.375.148,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.246.211.000,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.410.236.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	260.490.985,00	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	255.102.101,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.771.163.000,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	13.136.305.819,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	27.859.392.959,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	47.596.455.304,00	Tidak Sesuai	0

Program Penataan Bangunan Gedung	1.484.999.999,00	Program Penataan Bangunan Gedung	6.040.899.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	786.536.740,00	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	545.126.100,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Jalan	143.335.593.500,00	Program Penyelenggaraan Jalan	147.865.499.817,51	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100.000.000,00	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100.000.000,00	Sesuai	1
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	684.000.000,00	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	726.897.630,00	Tidak Sesuai	0
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
Program Pengembangan Perumahan	407.594.913,00	Program Pengembangan Perumahan	407.594.875,00	Sesuai	1
Program Kawasan Permukiman	18.220.982.294,00	Program Kawasan Permukiman	24.616.769.313,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	84.586.473,00	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	159.586.401,00	Tidak Sesuai	0
Pertanahan					
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1.132.678.625,00	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	588.404.825,00	Sesuai	1
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	294.914.000	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	0,00	Tidak Sesuai	0
Trantibum Linmas					

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.846.674.305,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.915.524.094,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.776.136.428,00	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.469.735.147,00	Tidak Sesuai	0
Program Penanggulangan Bencana	7.847.696.635,00	Program Penanggulangan Bencana	15.013.209.120,00	Tidak Sesuai	0
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	873.575.223,00	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	698.978.159,00	Tidak Sesuai	0
Sosial					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.289.721.806,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.368.142.547,00	Tidak Sesuai	0
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	4.948.870,00	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1.600.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Rehabilitasi Sosial	839.452.072,00	Program Rehabilitasi Sosial	839.397.175,00	Tidak Sesuai	0
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	5.693.790.262,00	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	5.693.790.230,00	Tidak Sesuai	0
Program Penanganan Bencana	234.304.125,00	Program Penanganan Bencana	231.342.905,00	Tidak Sesuai	0

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Tenaga Kerja					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.268.196.516,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.428.350.408,00	Tidak Sesuai	0
Program Perencanaan Tenaga Kerja	0,00	Program Perencanaan Tenaga Kerja	0,00	Sesuai	1
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.292.750.000,00	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.229.737.881,00	Tidak Sesuai	0
Program Penempatan Tenaga Kerja	2.200.000.000,00	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.212.288.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Hubungan Industrial	700.000.000,00	Program Hubungan Industrial	747.673.600,00	Tidak Sesuai	0
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.077.915.503,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.396.706.058,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	624.053.672,00	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	624.053.672,00	Sesuai	1
Program Perlindungan Perempuan	439.063.121,00	Program Perlindungan Perempuan	450.498.641,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	18.244.961,00	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	17.244.961,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	27.496.939,00	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	27.496.939,00	Sesuai	1
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	315.012.441,00	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	356.839.114,00	Tidak Sesuai	0

Program Perlindungan Khusus Anak	330.929.167,00	ProgramPerlindungan Khusus Anak	278.666.974,00	Tidak Sesuai	0
Pangan					
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.200.000.000,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.200.000.000,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	540.604.244,00	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	540.604.244,00	Sesuai	1
Program Penanganan Kerawanan Pangan	45.000.000,00	Program Penanganan Kerawanan Pangan	45.000.000,00	Sesuai	1
Program Pengawasan Keamanan Pangan	58.500.000,00	Program Pengawasan Keamanan Pangan	58.500.000,00	Sesuai	1
Lingkungan Hidup					
Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	10.333.482.683,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.054.044.487,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	459.543.226,00	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	742.552.900,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	24.000.000,00	Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	24.000.000,00	Sesuai	1
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingk& Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	78.430.615,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	78.430.615,00	Sesuai	1

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.390.229.445,00	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.558.182.001,00	Tidak Sesuai	0
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	12.678.932,00	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	12.678.932,00	Sesuai	1
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.250.000,00	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.250.000,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Persampahan	655.388.047,00	Program Pengelolaan Persampahan	2.628.439.085,00	Tidak Sesuai	0
Administrasi Kependudukan dan Capil					
Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	7.631.396.211,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.381.212.710,00	Tidak Sesuai	0
Program Pendaftaran Penduduk	2.009.795.288,00	Program Pendaftaran Penduduk	1.614.172.165,00	Tidak Sesuai	0
Program Pencatatan Sipil	67.486.890,00	Program Pencatatan Sipil	67.486.890,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.080.768.988,00	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.933.067.836,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	47.964.400,00	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	47.964.400,00	Sesuai	1
Pemberdayaan Masyarakat Desa					
Program Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	4.333.527.212,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.305.865.045,00	Tidak Sesuai	0
Program	200.000.000,00	Program	191.486.764,00	Tidak	0

Penataan Ds		Penataan Desa		Sesuai	
Program Peningkatan Kerjasama Desa	69.899.000,00	Program Peningkatan Kerjasama Desa	70.144.970,00	Tidak Sesuai	0
Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.405.416.978,00	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.733.014.903,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	767.400.000,00	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	772.398.318,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian Penduduk	594.350.141,00	Program Pengendalian Penduduk	594.350.141,00	Sesuai	1
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.436.711.520,00	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.978.812.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.220.900.000,00	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.220.900.000,00	Sesuai	1
Program Perlindungan Perempuan	450.498.641,00	Program Perlindungan Perempuan	540.498.641,00	Tidak Sesuai	0
Perhubungan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.011.148.708,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.011.180.708,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.372.156.795,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.447.124.795,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Pelayaran	15.793.125,00	Program Pengelolaan Pelayaran	15.793.125,00	Tidak Sesuai	0
Komunikasi Informatika					

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.059.439.012,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.059.439.012,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.094.291.529,00	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.094.291.529,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.454.702.419,00	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.454.702.419,00	Tidak Sesuai	0
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.213.036.429,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.393.851.687,00	Tidak Sesuai	0
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	75.000.000,00	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	82.299.400,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	195.313.451,00	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	195.313.451,00	Sesuai	1
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	0,00	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	0,00	Sesuai	1
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	16.198.106,00	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	15.534.106,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	193.801.894,00	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	413.807.400,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	283.208.180,00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan	217.659.105,00	Tidak Sesuai	0

Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		Usaha Mikro (UMKM)			
Program Pengembangan UMKM	1.737.778.605,00	Program Pengembangan UMKM	1.688.426.157,00	Tidak Sesuai	0
Penanaman Modal					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	4.522.968.209,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.373.303.015,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	282.655.892,00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	274.815.892,00	Tidak Sesuai	0
Program Promosi Penanaman Modal	440.496.249,00	Program Promosi Penanaman Modal	192.598.549,00	Tidak Sesuai	0
Program Pelayanan Penanaman Modal	476.919.080,00	Program Pelayanan Penanaman Modal	489.821.069,	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	630.572.000,00	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	655.532.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	113.350.520,00	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100.479.375,00	Tidak Sesuai	0
Kepemudaan dan Olah Raga					
Program Pengemb Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	890.264.621,00	Program Pengemb Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	890.264.621,00	Sesuai	1
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.794.587.898,00	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.305.428.886,00	Tidak Sesuai	0

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	238.122.247,00	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	238.122.247,00	Sesuai	1
Statistik					
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	747.854.832,00	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	712.819.769,00	Tidak Sesuai	0
Persandian					
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	320.986.589,00	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	271.686.589,00	Tidak Sesuai	0
Kebudayaan					
Program Pengembangan Kebudayaan	860.650.000,00	Program Pengembangan Kebudayaan	875.000.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	864.780.000,00	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	850.430.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Sejarah	0,00	Program Pembinaan Sejarah	0,00	Sesuai	1
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	0,00	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	0,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Permuseuman	800.000.000,00	Program Pengelolaan Permuseuman	800.000.000,00	Sesuai	1
Perpustakaan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.497.256.935,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.141.494.445,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Perpustakaan	11.445.818.242,00	Program Pembinaan Perpustakaan	11.447.030.646,00	Tidak Sesuai	0

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	7.367.854,00	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	5.992.854,00	Tidak Sesuai	0
Kearsipan					
Program Pengelolaan Arsip	244.575.100,00		254.524.955,00	Tidak Sesuai	0
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	6.350.000,00	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	6.600.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Perizinan Penggunaan Arsip	0,00	Program Perizinan Penggunaan Arsip	0,00	Sesuai	1
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
Kelautan dan Perikanan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.077.261.639,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.907.796.656,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	87.367.836,00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	89.802.836,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	235.000.000,00	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	232.950.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	9.960.000,00	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	9.960.000,00	Sesuai	1
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	28.991.733,00	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	28.991.733,00	Sesuai	1
Pariwisata					

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.855.506.503,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.907.393.300,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	777.105.000,00	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	842.937.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemasaran Pariwisata	250.000.000,00	Program Pemasaran Pariwisata	250.000.000,00	Sesuai	1
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	171.205.930,00	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	171.205.930,00	Sesuai	1
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	668.794.070,00	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	668.794.070,00	Sesuai	1
Pertanian					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.350.605.297,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.951.822.315,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.079.106.890,00	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.003.248.165,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	16.053.805.780,00	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.940.100.020,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesmas Veteriner	2.494.037.551,00	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.493.578.406,00	Tidak Sesuai	0

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	57.499.720,00	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	7.499.720,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyuluhan Pertanian	3.891.912.762,00	Program Penyuluhan Pertanian	113.187.404,00	Tidak Sesuai	0
Program Perizinan Usaha pertanian	4.999.960,00	Program Perizinan Usaha pertanian	4.999.960,00	Sesuai	1
Perdagangan					
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	8.000.000,00	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	8.000.000,0	Sesuai	1
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.083.884.252,00	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.343.884.252,00	Tidak Sesuai	0
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	66.551.820,00	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	77.891.820,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Ekspor	298.071.580,00	Program Pengembangan Ekspor	290.011.580,00	Tidak Sesuai	0
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	135.278.395,00	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	135.278.395,00	Sesuai	1
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	72.187.400,00	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	68.907.400,00	Tidak Sesuai	0
Perindustrian					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.829.325.416,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.763.303.153,00	Tidak Sesuai	0

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.036.312.000,00	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.033.112.000,0	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	10.000.000,00	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	13.200.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	15.000.000,00	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	15.000.000,00	Sesuai	1
Transmigrasi		Transmigrasi			
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	175.000.000,00	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	185.849.511,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Sekretariat Daerah					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.336.785.000,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.336.785.000,00	Sesuai	1
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1.072.828.000,00	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	Tidak Sesuai	0
Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.069.525.000,00	Program Perekonomian Dan Pembangunan	958.546.219,00	Tidak Sesuai	0
Sekretariat DPRD					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.548.449.959,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.245.968.062,00	Tidak Sesuai	0
Program Dukungan	29.093.207.008,00	Program Dukungan	28.093.224.258,00	Tidak Sesuai	0

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Perencanaan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.548.449.959,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.752.803.563,00	Tidak Sesuai	0
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.867.255.551,00	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.627.255.551,0	Tidak Sesuai	0
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.234.880.851,00	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.259.880.849,00	Tidak Sesuai	0
Keuangan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.197.781.821,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.037.130.871,51	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	398.302.874.039,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	395.903.431.845,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.801.253.222,00	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.801.253.222,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.794.635.154,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.794.628.123,00	Tidak Sesuai	0
Kepegawaian					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.498.441.494,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.446.023.791,00	Tidak Sesuai	0

ota					
Program Kepegawaian Daerah	2.065.368.798,00	Program Kepegawaian Daerah	2.001.270.953,00	Tidak Sesuai	0
Pendidikan dan Pelatihan					
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.814.594.010,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.616.259.740,00	Tidak Sesuai	0
Penelitian dan Pengembangan					
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.000.000.000,00	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.000.000.000,00	Sesuai	1
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.498.441.494,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.289.070.165,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.738.703.000,00	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.744.069.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.535.924.905,00	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.654.547.026,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR KEWILAYAHAN					
Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	61.536.823.204	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73.275.657.860,00	Tidak Sesuai	0

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	602.318.854	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	361.944.616,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	13.766.141.914	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	908.852.013,00	Tidak Sesuai	0
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.822.104.790	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	688.799.657,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.009.176.500	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.261.436.101,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.417.378.750	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	842.989.506,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
Kesatuan Bangsa dan Politik					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.376.128.274,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.333.889.014,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	57.584.917.760,00	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budpol	57.877.447.992,00	Tidak Sesuai	0

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.165.000.000,00	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.145.002.232,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	87.867.920,00	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	107.865.688,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.029.512.500,00	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.029.512.500,00	Sesuai	1
TOTAL SKOR/ NILAI					37

Jumlah Sesuai : 37

Jumlah Tidak Sesuai : 131

Jumlah Program : 168

Skor/ Nilai = Jumlah Skor Kesesuaian / Jumlah Program

= 37 / 168

= 0,22

e. Kesesuaian Pagu Program KUA PPAS dan APBD

KUA PPAS		APBD		SESUAI / TIDAK SESUAI	SKOR/ NILAI
URUSAN	PAGU	URUSAN	PAGU		
1	2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Pendidikan					
Program Penunjang Urusan	673.387.661.316,00	Program Penunjang Urusan	682.881.566.550,63	Tidak Sesuai	0

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Program Pengelolaan Pendidikan	158.117.693.123,00	Program Pengelolaan Pendidikan	163.634.631.822,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Kurikulum	836.308.766,00	Program Pengembangan Kurikulum	798.708.766,00	Tidak Sesuai	0
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	12.811.490.800,00	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	12.811.490.800,00	Sesuai	1
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	21.120.000,00	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	21.120.000,00	Sesuai	1
Kesehatan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	117.097.502.704,01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	116.800.422.003,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	67.109.337.919,99	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	67.112.958.921,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.845.616.177,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.139.075.877,00	Tidak Sesuai	0
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	640.070.380,00	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	640.070.380,00	Sesuai	1
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	742.262.456,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	742.262.456,00	Sesuai	1
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	60.959.375.148,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	56.459.375.148,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.410.236.000,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.610.559.420,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	255.102.101,00	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	255.102.101,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	13.136.305.819,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	14.978.305.819,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	47.596.455.304,0	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	34.685.289.358,00	Tidak Sesuai	0
Program Penataan Bangunan Gedung	6.040.899.500,00	Program Penataan Bangunan Gedung	6.240.899.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	545.126.100,00	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	545.126.100,00	Sesuai	1
Program Penyelenggaraan Jalan	147.865.499.817,51	Program Penyelenggaraan Jalan	157.277.114.764,26	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100.000.000,00	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100.000.000,00	Sesuai	1
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	726.897.630,00	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	726.897.630,00	Sesuai	1
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					

Program Kawasan Permukiman	24.616.769.313,00	Program Kawasan Permukiman	26.968.269.313,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	159.586.401,00	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	159.586.401,00	Sesuai	1
Pertanahan					
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	588.404.825,00	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	588.404.825,00	Sesuai	1
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	0,00	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	00,0	Sesuai	1
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.915.524.094,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.374.675.784,00	Tidak Sesuai	0
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.469.735.147,00	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.461.535.147,00	Tidak Sesuai	0
Program Penanggulangan Bencana	7.726.959.292,00	Program Penanggulangan Bencana	7.621.486.862,70	Tidak Sesuai	0
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	698.978.159,00	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	698.978.159,00	Sesuai	1
Sosial					

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.368.142.547,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.368.142.655,00	Tidak Sesuai	0
Program Rehabilitasi Sosial	839.397.175,00	Program Rehabilitasi Sosial	1.114.397.175,00	Tidak Sesuai	0
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	5.693.790.230,00	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	9.168.790.230,00	Tidak Sesuai	0
Program Penanganan Bencana	231.342.905,00	Program Penanganan Bencana	231.342.905,00	Sesuai	1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Tenaga Kerja					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.428.350.408,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.677.382.364,00	Tidak Sesuai	0
Program Perencanaan Tenaga Kerja	0,00	Program Perencanaan Tenaga Kerja	0,00	Sesuai	1
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.229.737.881,00	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.848.527.125,00	Tidak Sesuai	0
Program Penempatan Tenaga Kerja	2.212.288.000,00	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.962.288.000,00		
Program Hubungan Industrial	747.673.600,00	Program Hubungan Industrial	747.673.600,00	Sesuai	1
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.396.706.058,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.396.706.058,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	17.244.961,00	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	17.244.961,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	27.496.939,00	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	27.496.939,00	Sesuai	1
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	356.839.114,00	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	356.839.114,00	Sesuai	1
Program Perlindungan Khusus Anak	278.666.974,00	Program Perlindungan Khusus Anak	278.666.974,00	Sesuai	1
Pangan					
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.200.000.000,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.200.000.000,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	540.604.244,00	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	540.604.244,00	Sesuai	1
Program Penanganan Kerawanan Pangan	45.000.000,00	Program Penanganan Kerawanan Pangan	45.000.000,00	Sesuai	1
Program Pengawasan Keamanan Pangan	58.500.000,00	Program Pengawasan Keamanan Pangan	58.500.000,00	Sesuai	1
Lingkungan Hidup					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.054.044.487,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.037.044.487,00	Tidak Sesuai	0

Program Perencanaan Lingkungan Hidup	300.000.000,00	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	300.000.000,00	Sesuai	1
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.808.412.140,00	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.881.966.273,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	742.552.900,00	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	867.552.900,00	Sesuai	1
Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	24.000.000,00	Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	24.000.000,00	Sesuai	1
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	78.430.615,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	78.430.615,00	Sesuai	1
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	12.678.932,00	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	12.678.932,00	Sesuai	1
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.250.000,00	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.250.000,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Persampahan	2.628.439.085,0	Program Pengelolaan Persampahan	2.703.439.085,00	Tidak Sesuai	0
Administrasi Kependudukan dan Capil					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7.381.212.710,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7.550.380.483,00	Tidak Sesuai	0

Program Pendaftaran Penduduk	1.614.172.165,00	Program Pendaftaran Penduduk	2.894.580.965,00	Tidak Sesuai	0
Program Pencatatan Sipil	67.486.890,00	Program Pencatatan Sipil	67.486.890,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.933.067.836,00	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.763.900.062,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	47.964.400,00	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	47.964.400,00	Sesuai	1
Pemberdayaan Masyarakat Desa					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.305.865.045,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.305.865.045,00	Sesuai	1
Program Penataan Ds	191.486.764,00	Program Penataan Desa	191.486.764,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Kerjasama Desa	70.144.970,00	Program Peningkatan Kerjasama Desa	70.144.970,00	Sesuai	1
Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.733.014.903,00	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.733.014.903,00	Sesuai	1
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	772.398.318,00	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	772.398.318,00	Sesuai	1
Program Pengendalian Penduduk	477.677.500,00	Program Pengendalian Penduduk	477.677.500,00	Sesuai	1
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.436.711.520,0	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.978.812.000,00	Tidak Sesuai	0

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.220.900.000,00	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.220.900.000,00	Sesuai	1
Program Perlindungan Perempuan	155.548.809,00	Program Perlindungan Perempuan	540.498.641,00	Tidak Sesuai	0
Perhubungan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.011.148.708,00	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	39.011.180.708,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.372.156.795,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.447.124.795,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Pelayaran	15.793.125,00	Program Pengelolaan Pelayaran	15.793.125,00	Sesuai	1
Komunikasi Informatika					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.059.439.012,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.059.318.576,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.094.291.529,00	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.962.495.972,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.454.702.419,00	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.519.343.659,00	Tidak Sesuai	0
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.393.851.687,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.393.851.687,00	Sesuai	1

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	82.299.400,00	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	82.299.400,00	Sesuai	1
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	195.313.451,00	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	195.313.451,00	Sesuai	1
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	15.534.106,00	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	15.534.106,00	Sesuai	1
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	194.465.894,00	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	194.465.894,00	Sesuai	1
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	217.659.105,00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	217.659.105,00	Sesuai	1
Program Pengembangan UMKM	1.688.426.157,00	Program Pengembangan UMKM	1.763.426.157,00	Tidak Sesuai	0
Penanaman Modal					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.373.303.015,00	Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota	4.520.900.001,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	274.815.892,00	Program Pengemb Iklim Penanaman Modal	262.964.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Promosi Penanaman Modal	192.598.549,00	Program Promosi Penanaman Modal	56.852.955,00	Tidak Sesuai	0
Program Pelayanan Penanaman Modal	489.821.069,00	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.089.821.069,00	Tidak Sesuai	0

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	655.532.000,00	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	655.532.000,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100.479.375,00	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100.479.375,00	Sesuai	1
Kepemudaan dan Olah Raga					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.665.086.946,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.654.533.554,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	890.264.621,00	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.040.264.621,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.305.428.886,00	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.315.982.278,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	238.122.247,00	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	238.122.247,00	Sesuai	1
Statistik					
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	712.819.769,00	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	745.754.832,00	Tidak Sesuai	0
Persandian					
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	271.686.589,00	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	271.686.589,00	Sesuai	1
Kebudayaan					
Program Pengembangan Kebudayaan	875.000.000,00	Program Pengembangan Kebudayaan	875.000.000,00	Sesuai	1

Program Pengembangan Kesenian Tradisional	850.430.000,00	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.090.580.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Sejarah	0,00	Program Pembinaan Sejarah	0,00	Sesuai	1
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	0,00	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	0,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Permuseuman	800.000.000,00	Program Pengelolaan Permuseuman	800.000.000,00	Sesuai	1
Perpustakaan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.141.494.445,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.286.372.723,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Perpustakaan	11.447.030.646,00	Program Pembinaan Perpustakaan	11.991.152.223,00	Tidak Sesuai	0
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	5.992.854,00	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	5.992.854,00		
Kearsipan					
Program Pengelolaan Arsip	254.524.955,00	Program Pengelolaan Arsip	253.505.100,00	Tidak Sesuai	0
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	6.600.000,00	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	4.620.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Perizinan Penggunaan Arsip	0,00	Program Perizinan Penggunaan Arsip	0,00	Sesuai	1
URUSAN PEMERINTAH AN PILIHAN					

Kelautan dan Perikanan					
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	89.802.836,00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	289.492.836,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	232.950.000,00	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	335.000.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	9.960.000,00	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	9.960.000,00	Sesuai	1
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	28.991.733,00	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	28.991.733,00	Sesuai	1
Pariwisata					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.907.393.300,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.907.393.300,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	842.937.500,00	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.692.937.500,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemasaran Pariwisata	250.000.000,00	Program Pemasaran Pariwisata	425.000.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	171.205.930,00	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	171.205.930,00	Sesuai	1
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	668.794.070,00	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	368.794.070,00	Tidak Sesuai	0

Pertanian					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.289.296.324,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.163.080.559,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.048.895.047,00	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.729.510.812,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.967.196.847,00	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.268.696.847,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.493.578.406,00	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.498.182.455,00	Tidak Sesuai	0
Program Perizinan Usaha pertanian	4.999.960,00	Program Perizinan Usaha pertanian	4.999.960,00	Sesuai	1
Perdagangan					
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	8.000.000,00	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	8.000.000,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.343.884.252,00	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.915.884.252,00	Tidak Sesuai	0
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	77.891.820,00	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	77.891.820,00	Sesuai	1
Program Pengembangan Ekspor	290.011.580,00	Program Pengembangan Ekspor	290.011.580,00	Sesuai	1
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	135.278.395,00	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	135.278.395,00	Sesuai	1

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	68.907.400,00	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	68.907.400,00	Sesuai	1
Perindustrian					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.763.303.153,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.766.303.153,00	Tidak Sesuai	0
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.033.112.000,00	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.233.112.000,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	13.200.000,00	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	13.200.000,00	Sesuai	1
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	15.000.000,00	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	15.000.000,00	Sesuai	1
Transmigrasi		Transmigrasi			
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	185.849.511,00	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	185.849.511,00	Sesuai	1
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Sekretariat Daerah					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.336.785.000,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.336.785.000,00	Sesuai	1
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	Sesuai	1

Program Perekonomian Dan Pembangunan	958.546.219,00	Program Perekonomian Dan Pembangunan	559.625.000,00	Sesuai	1
Sekretariat DPRD					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.245.968.062,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.787.162.794,00	Tidak Sesuai	0
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	28.093.224.258,00	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	27.863.573.842,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Perencanaan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.752.803.563,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.752.803.563,00	Sesuai	1
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.627.255.551,00	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.627.255.551,00	Sesuai	1
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.259.880.849,00	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.259.880.849,00	Sesuai	1
Keuangan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.037.130.871,51	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.641.787.499,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	395.903.431.845,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	402.432.018.050,00	Tidak Sesuai	0

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.801.253.222,00	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.340.753.222,00	Tidak Sesuai	0
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.794.628.123,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.782.628.123,00	Tidak Sesuai	0
Kepegawaian					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.446.023.791,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.390.965.068,00	Tidak Sesuai	0
Program Kepegawaian Daerah	2.001.270.953,00	Program Kepegawaian Daerah	2.213.604.988,00	Tidak Sesuai	0
Pendidikan dan Pelatihan					
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.616.259.740,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.458.984.428,00	Tidak Sesuai	0
Penelitian dan Pengembangan					
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.000.000.000,00	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.000.000.000,00	Sesuai	1
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
Inspektorat					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.289.070.165,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.282.145.165,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.744.069.000,00	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.741.803.000,00	Tidak Sesuai	0

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.654.547.026,00	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.663.738.026,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR KEWILAYAHAN					
Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73.275.657.860,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73.205.900.903,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	361.944.616,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	374.520.568,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	908.852.013,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	898.413.356,00	Tidak Sesuai	0
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	688.799.657,00	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	691.281.720,00	Tidak Sesuai	0
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.261.436.101,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.279.062.458,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	842.989.506,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	797.954.527,00	Tidak Sesuai	0
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
Kesatuan Bangsa dan Politik					

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.333.889.014,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.380.503.014,00	Tidak Sesuai	0
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.000.399.999,00	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.000.399.999,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	57.877.447.992,00	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budpol	57.987.983.832,00	Tidak Sesuai	0
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.145.002.232,00	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.745.002.232,00	Tidak Sesuai	0
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	107.865.688,00	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	107.865.688,00	Sesuai	1
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.029.512.500,00	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.126.598.500,00	Tidak Sesuai	0
TOTAL SKOR/ NILAI					77

Jumlah Sesuai : 77

Jumlah Tidak Sesuai : 91

Jumlah Program : 168

$$\begin{aligned}\text{Skor/ Nilai} &= \text{Jumlah Skor Kesesuaian} / \text{Jumlah Program} \\ &= 77 / 168 \\ &= 0,45\end{aligned}$$

Maka perhitungan Skor Dimensi 1 IPKD adalah;

Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD

$$\begin{aligned}&= \text{Skor Rerata} \times \text{Bobot} \\ &= ((1 + 1 + 1 + 0,22 + 0,45) / 5) \times 20 \\ &= (3,67 / 5) \times 20 \\ &= 0,734 \times 20 \\ &= 14,68\end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh capaian kinerja Dimensi 1 sebesar: 14,68

2. Perhitungan Skor/ Nilai Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan salah satu dimensi yang diukur dalam IPKD, dimana indikator-indikator yang terdapat dalam dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD merupakan beberapa amanat peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), antara lain:

- a. Alokasi jumlah belanja untuk urusan pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD

PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2024 KABUPATEN BLITAR			
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	
1	a. Urusan Bidang Pendidikan :		860.147.517.939,00
	1 Belanja Operasi		
	a Belanja pegawai	678.187.176.139,00	
	b Belanja barang dan jasa	104.832.278.655,00	
	c Belanja hibah	47.773.458.700,00	
	d Belanja bantuan sosial	4.173.200.000,00	
	2 Belanja Modal	25.181.404.445,00	
	b. Urusan Bidang Kebudayaan		12.330.910.800,00
	1 Belanja Operasi		
	a Belanja pegawai	4.078.643.300,00	
	b Belanja barang dan jasa	7.019.910.553,00	
	c Belanja hibah	850.430.000,00	
	d Belanja bantuan sosial	0,00	
	2 Belanja Modal	381.926.947,00	
	c. Urusan Bidang Perpustakaan		15.541.642.900,00
	1 Belanja Operasi		
	a Belanja pegawai	2.092.832.900,00	
	b Belanja barang dan jasa	2.675.932.310,00	
	c Belanja hibah	0,00	
	d Belanja bantuan sosial	0,00	
	2 Belanja Modal	10.772.877.690,00	
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		10.248.902.700,00
	1 Belanja Operasi		
	a Belanja pegawai	1.328.317.700,00	
	b Belanja barang dan jasa	3.440.234.818,00	
	c Belanja hibah	5.235.000.000,00	
	d Belanja bantuan sosial	0,00	
	2 Belanja Modal	245.350.182,00	
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain :		
	1 Belanja Transfer		
	Belanja bantuan keuangan	0,00	
	2 Sub keg.....pada SKPD.....dst	0,00	
2	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Jumlah (a+b)		898.268.974.339,00
3	Total Belanja Daerah		2.876.863.607.696,51
4	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah (Butir 2 : Butir 3) X 100%		31,22%

Alokasi jumlah belanja APBD TA 2024 untuk urusan pendidikan sebesar 31,22%, telah memenuhi minimal 20% dari APBD.

- b. Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD (di luar gaji)

PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA KESEHATAN			
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2024			
KABUPATEN BLITAR			
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	
1	a. Urausan Bidang Kesehatan :		589.156.803.578,88
	1 Belanja Operasi		
	a Belanja pegawai	118.618.974.400,00	
	b Belanja barang dan jasa	355.703.536.183,88	
	c Belanja hibah	300.000.000,00	
	d Belanja bantuan sosial	0,00	
	2 Belanja Modal	114.534.292.995,00	
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan Bidang Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain :		0,00
	1 Belanja Transfer		
	Belanja bantuan keuangan	0,00	
	2 Sub Kegiatan.....pada SKPD.....dst	0,00	
2	Anggaran Kesehatan (a+b)		589.156.803.578,88
3	Total Belanja Daerah		2.876.863.607.696,51
4	Gaji ASN		709.995.912.412,63
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		2.166.867.695.283,88
4	Rasio Anggaran Kesehatan		
	(2 : 5) X 100%		27,19%

Alokasi jumlah belanja APBD TA 2024 untuk urusan kesehatan sebesar 27,19%, telah memenuhi minimal 10% dari APBD.

- c. Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur sebesar minimal 40% dari Dana Transfer Umum

PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA INFRASTRUKTUR			
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2024			
KABUPATEN BLITAR			
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	
1	Total Belanja Daerah	2.876.863.607.696,51	
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa :		
	a Belanja bagi hasil	11.874.152.773,00	
	b Bantuan keuangan	382.087.488.000,00	
	Jumlah (a+b)	393.961.640.773,00	
3	Selisih (1-2)	2.482.901.966.923,51	
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x selisih)	993.160.786.769,40	
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	
1	a Belanja Modal	437.745.283.221,05	
	1 Tanah	4.102.940.000,00	
	2 Peralatan dan mesin	54.583.525.543,13	
	3 Bangunan dan gedung	132.697.625.706,00	
	4 Jalan, irigasi dan jaringan	246.361.191.971,92	
	5 Aset tetap lainnya	0,00	
	6 Aset lainnya	0,00	
	b Belanja Pemeliharaan	19.096.876.313,30	
2	a Belanja Hibah	123.379.783.296,00	
	b Belanja Bantuan Sosial	32.017.388.256,00	
	c Belanja Bantuan Keuangan	382.087.488.000,00	537.484.659.552,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	40,05	994.326.819.086,35

Alokasi jumlah belanja APBD TA 2024 untuk urusan kesehatan sebesar 40,05%, telah memenuhi minimal 40% dari APBD.

Selanjutnya rekapitulasi Skor Dimensi pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	PRASYARAT	SKOR
Alokasi jumlah belanja untuk urusan pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	1
Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD (di luar gaji)	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	1
Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	1
Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	1
TOTAL SKOR		4
SKOR RERATA		1

Maka perhitungan Skor Dimensi 2 IPKD adalah;

Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD

= Skor Rerata x Bobot

= 1 x 20

= 20,0000

3. Perhitungan Skor/ Nilai Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi pengelolaan keuangan daerah diukur dengan indikator ketepatan waktu dan keteraksesan terhadap dokumen-dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diakses melalui website <https://transparansi.blitarkab.go.id/> sebagai berikut:

No	INDIKATOR	INDIKATOR							JUMLAH
		KETEPATAN WAKTU						KETERAKSESAN	
		TGL PENETAPAN	TGL UNGGAH	RW/ RENTANG WAKTU (HARI)	BAU/ BATAS AKHIR UNGGAH (HARI)	S/ TS (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	NILAI		
		1	2	3 = 2 - 1	4	5	6		
1	Informasi Ringkasan Dokumen RKPD			30	30	TS	0	1	1
2	Informasi Kebijakan Umum Anggaran			30	30	TS	0	1	1
3	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Platfon Anggaran			30	30	TS	0	1	1
4	Informasi Ringkasan Dokumen RKA-SKPD			30	30	TS	0	1	1
5	Informasi Ringkasan Dokumen RKA-PPKD			30	30	TS	0	1	1
6	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perda tentang APBD			30	30	TS	0	1	1
7	Informasi Peraturan Daerah tentang APBD			30	30	TS	0	1	1
8	Informasi Perkada tentang Penjabaran APBD			30	30	TS	0	1	1
9	Informasi Ringkasan DPA SKPD			30	30	TS	0	1	1
10	Informasi DPA SKPD			30	30	TS	0	1	1
11	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah			30	30	TS	0	1	1
12	Informasi Realisasi Belanja Daerah			30	30	TS	0	1	1

13	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah			30	30	TS	0	1	1
14	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD			>30	30	TS	0	1	1
15	Informasi Perda tentang Perub APBD			>30	30	TS	0	1	1
16	Informasi Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD			>30	30	TS	0	1	1
17	Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD			>30	30	TS	0	1	1
18	Informasi Rencana Umum Pengadaan			30	30	TS	0	1	1
19	Informasi SK Kepala Daerah tentang PPKD			30	30	TS	0	1	1
20	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi			30	30	TS	0	1	1
21	Informasi Laporan Arus Kas			30	30	TS	0	1	1
22	Informasi LRA Seluruh SKPD			30	30	TS	0	1	1
23	Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD			30	30	TS	0	1	1
24	Informasi Neraca			30	30	TS	0	1	1
25	Informasi CaLK Pemda			30	30	TS	0	1	1
26	Informasi Laporan Keuangan BUMD/ Perusahaan Daerah			30	30	TS	0	1	1
27	Informasi LKjIP Tahunan Pemda			30	30	TS	0	1	1
28	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			30	30	TS	0	1	1
29	Informasi Opini BPK			30	30	TS	0	1	1
TOTAL							0	29	29
RATA-RATA							0	1,00	1,00

Maka perhitungan Skor Dimensi 3 IPKD adalah
 Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD
 $= \text{Skor Rerata} \times \text{Bobot}$
 $= 0.5 \times 15$
 $= 7.5$

4. Perhitungan Skor/ Nilai Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD

Penentuan skor masing-masing indikator untuk dimensi penyerapan anggaran adalah persentase antara anggaran belanja dengan realisasinya. Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau di atas 80% (lebih dari 80%) maka mendapatkan Skor 1. Sebaliknya, persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80%, maka skor diberi angka 0.

INDIKATOR PENYERAPAN	ANGGARAN	REALISASI	% PENYERAPAN ANGGARAN	SKOR
Anggaran Belanja Pegawai	1.057.494.137.422,63	1.002.356.768.383,00	94,79%	1
Anggaran Belanja Bunga	0	0	0,00%	0
Anggaran Belanja Subsidi	0	0	0,00%	0
Anggaran Belanja Hibah	123.379.804.596,00	122.976.212.467,00	99,67%	1
Anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	393.961.640.773,00	391.784.051.797,00	99,45%	1
Anggaran Belanja Tidak Terduga	5.931.391.548,00	5.042.146.523,00	85,01%	1
Anggaran Barang dan Jasa	856.937.031.366,83	784.495.953.666,70	91,55%	1
Anggaran Belanja Modal	439.003.163.734,05	411.261.801.188,26	93,68%	1
TOTAL SKOR				6
RERATA SKOR				0,75

Maka perhitungan Skor Dimensi 4 IPKD adalah;
 Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD
 $= \text{Skor Rerata} \times \text{Bobot}$
 $= 0,75 \times 20$
 $= 15,0000$

5. Perhitungan Skor/ Nilai Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah

Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dinilai dari indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Kemandirian Keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Fleksibilitas Keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*).
- c. Solvabilitas Operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.
- d. Solvabilitas Jangka Pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan.
- e. Solvabilitas Jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.
- f. Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan public yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.

Berdasarkan Surat dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.3/6145/BSKDN Tanggal 13 Desember 2024, maka didapatkan Hasil Penghitungan Dimensi 5 pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 (Tahun Ukur 2024) dengan Kategori Kemampuan Keuangan Daerah “Sedang”, maka Hasil Pengukuran Dimensi 5 IPKD Tahun 2023 sebesar 4,418. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2022 sebesar 2,977, dengan ilustrasi (terlampir) sebagai berikut:

- 14 -

No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
45.	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	7,566	19,483	14,483	15	3,139	15	74,671	Perlu Perbaikan	B
46.	PIDIE JAYA	9,45	14,828	11,897	20	3,382	15	74,556	Perlu Perbaikan	B
47.	PAKPAK BHARAT	11,742	19,483	10,086	15	3,1	15	74,411	Perlu Perbaikan	B
48.	BANYUASIN	9,174	19,655	12,414	15	2,929	15	74,172	Perlu Perbaikan	B
49.	LOMBOK TIMUR	9,637	19,828	12,931	15	1,725	15	74,121	Perlu Perbaikan	B
50.	REMBANG	9,134	15	11,638	20	3,347	15	74,119	Perlu Perbaikan	B
51.	OGAN KOMERING ULU	6,479	19,31	13,966	15	4,169	15	73,924	Perlu Perbaikan	B
52.	KOLAKA UTARA	10,258	19,483	10,086	15	3,887	15	73,714	Perlu Perbaikan	B
53.	KOTAWARINGIN TIMUR	7,418	20	11,121	15	5,151	15	73,689	Perlu Perbaikan	B
54.	SAROLANGUN	7,811	19,655	11,897	15	4,239	15	73,602	Perlu Perbaikan	B
55.	HUMBANG HASUNDUTAN	12,622	19,655	8,017	15	3,157	15	73,451	Perlu Perbaikan	B
56.	MAMUJU	9,128	19,31	12,155	15	2,821	15	73,415	Perlu Perbaikan	B
57.	BLITAR	7,17	20	11,121	15	4,418	15	72,708	Perlu Perbaikan	B
58.	KEPULAUAN ANAMBAS	9,991	18,966	13,966	10	4,61	15	72,532	Perlu Perbaikan	B
59.	OGAN KOMERING ILIR	10,515	19,828	13,707	10	3,187	15	72,237	Perlu Perbaikan	B
60.	KONawe SELATAN	10,642	20	13,448	15	1,976	10,005	71,071	Perlu Perbaikan	B
61.	DELI SERDANG	12,776	19,828	6,983	10	6,183	15	70,769	Perlu Perbaikan	B
62.	SEKADAU	9,244	14,655	7,759	20	3,276	15	69,933	Perlu Perbaikan	B
63.	BENGKAYANG	10,671	19,828	13,448	15	0,841	10,005	69,793	Perlu Perbaikan	B
64.	PESISIR BARAT	8,749	17,586	11,121	15	2,036	15	69,491	Perlu Perbaikan	B
65.	LABUHANBATU SELATAN	9,181	19,483	6,466	15	3,885	15	69,015	Perlu Perbaikan	B
66.	LINGGA	7,756	13,103	14,741	15	3,002	15	68,603	Perlu Perbaikan	B

6. Perhitungan Skor/ Nilai Opini BPK

Pemberian opini atas LKPD oleh BPK RI sesuai dengan amanat perundang-undangan. Pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan pada tingkat kesesuaian implementasi pengelolaan keuangan daerah pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), ketaatan pada peraturan perundang-undangan, kecukupan bukti, dan system pengendalian internal pemerintah.

Berdasarkan hasil opini BPK RI atas LKPD, maka dalam pengukuran skor Dimensi Opini BPK diperoleh dengan kriteria:

- a. Apabila pemerintah daerah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut, maka diberikan Skor 1;
- b. Apabila pemerintah daerah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 2 tahun terakhir secara berturut-turut, maka diberikan Skor $2/3$ (0,667);
- c. Apabila pemerintah daerah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 1 tahun terakhir, maka diberikan Skor $1/3$ (0,334);
- d. Apabila pemerintah daerah memperoleh Opini *Disclaimer*, maka diberikan Skor 0.

Pemerintah Kabupaten Blitar dalam 3 tahun terakhir (Tahun 2021-2023) secara berturut-turut telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka mendapatkan Skor 1.

Bobot Dimensi 6 IPKD (Opini BPK) sebesar 15, sehingga formulasi perhitungan Skor adalah sebagai berikut:

Indeks Dimensi Opini BPK:

= Skor x Bobot

= 1 x 15

= 15

Dengan melaksanakan perhitungan IPKD di atas, maka total skor IPKD Kabupaten Blitar Tahun 2023 dapat diformulasikan sebagai berikut:

= Dimensi 1 + Dimensi 2 + Dimensi 3 + Dimensi 4 + Dimensi 5 + Dimensi 6

= 14,68 + 20 + 7,5 + 15 + 4,418 + 15

= 76,598

LAMPIRAN

KERTAS KERJA EVALUASI MANDIRI SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
	TOTAL NILAI SAKIP			73,00		
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,00		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	BB	4,80		
Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.					
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.					
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.					
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.					
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.					
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.					
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	BB	7,20		
Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.					

2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.		
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.		
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.		
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		
7	Target yg ditetapkan dlm Perenc Kinerja dpt dicapai (achievable), menantang, & realistis.		
	- Dapat Dicapai (<i>achievable</i>)		
	- Perencanaan Kinerja Menantang		
	- Perencanaan Kinerja Realistis		
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>Cascading</i>).		
	- Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>Cascading</i>)		
	- Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang selaras yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>Cascading</i>)		
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>).		
	- Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>)		

	- Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang strategi tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>)		
	- Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang kebijakan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>)		
	- Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>)		
10	Setiap unit usaha merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		
	- Setiap unit/satuan kerja merumuskan Perencanaan Kinerja		
	- Setiap unit/satuan kerja menetapkan Perencanaan Kinerja		
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		
	- Setiap pegawai merumuskan Perencanaan Kinerja		
	- Setiap pegawai kerja menetapkan Perencanaan Kinerja		
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB
		12,00	
Kriteria:			
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.		
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.		
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .		
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		

5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.		
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.		
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		
	- Setiap unit/satuan kerja memahami dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan		
	- Setiap unit/satuan kerja peduli dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan		
	- Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan		
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		
	- Setiap pegawai memahami dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan		
	- Setiap pegawai peduli dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan		
	- Setiap pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan		
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	21,00
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.		
	- Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja		
	- Terdapat pedoman teknis pengumpulan data kinerja		
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		

	- Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja					
	- Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas cara mengukur indikator kinerja.					
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.					
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	B	6,30		
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja.					
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.					
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.					
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.					
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.					
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	B	10,50		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.					
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.					

3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.		
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.		
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.		
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	10,50
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,10
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.		
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.		
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.		
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.		
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.		

3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	B	3,15		
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.					
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.					
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.					
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.					
	- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan target jangka menengah					
	- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah					
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.					
	- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya					
	- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya					
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).					
	- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)					

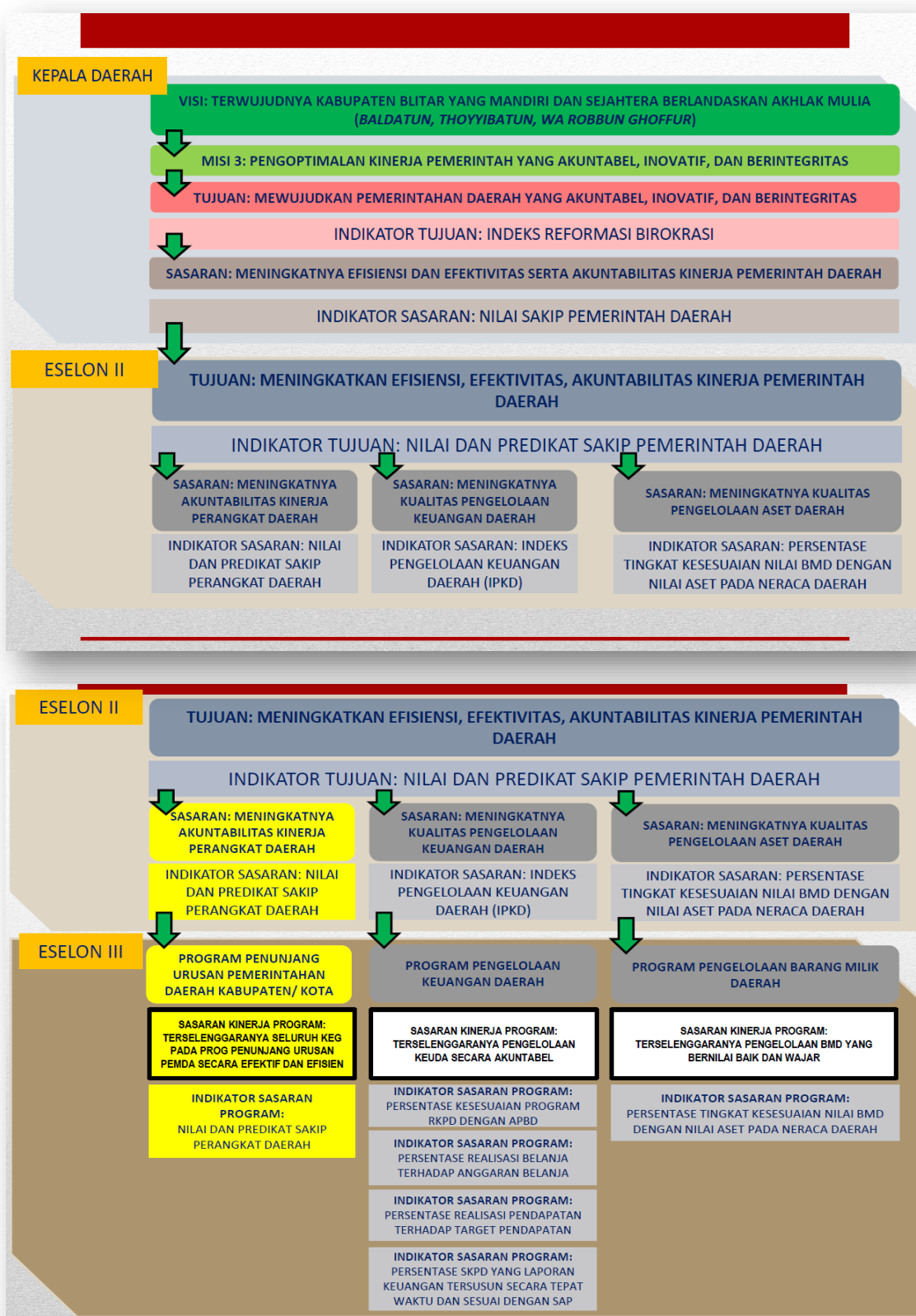
	- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)		
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.		
	- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja		
	- Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya nyata dan/atau hambatannya		
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.		
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).		
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B
		5,25	
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).		
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.		
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.		
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.		
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.		
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.		

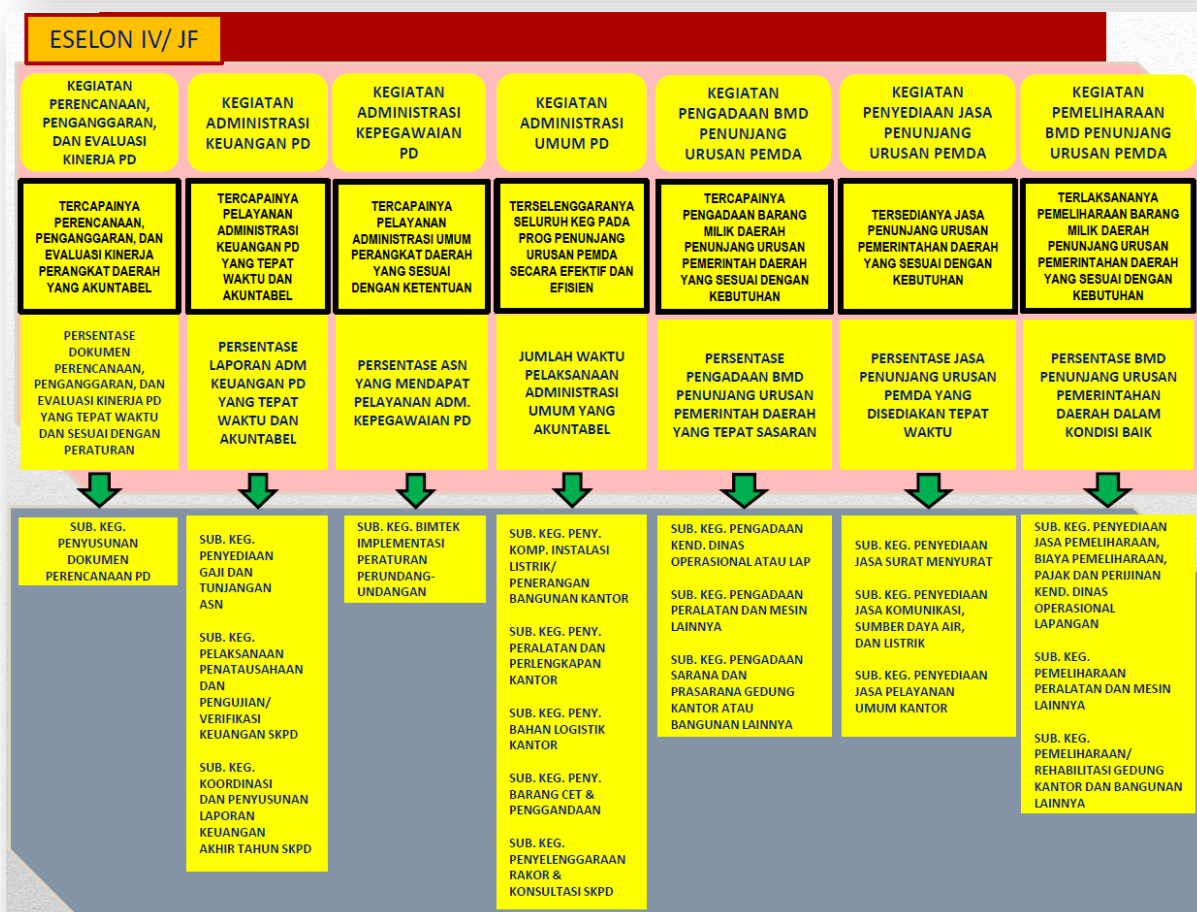
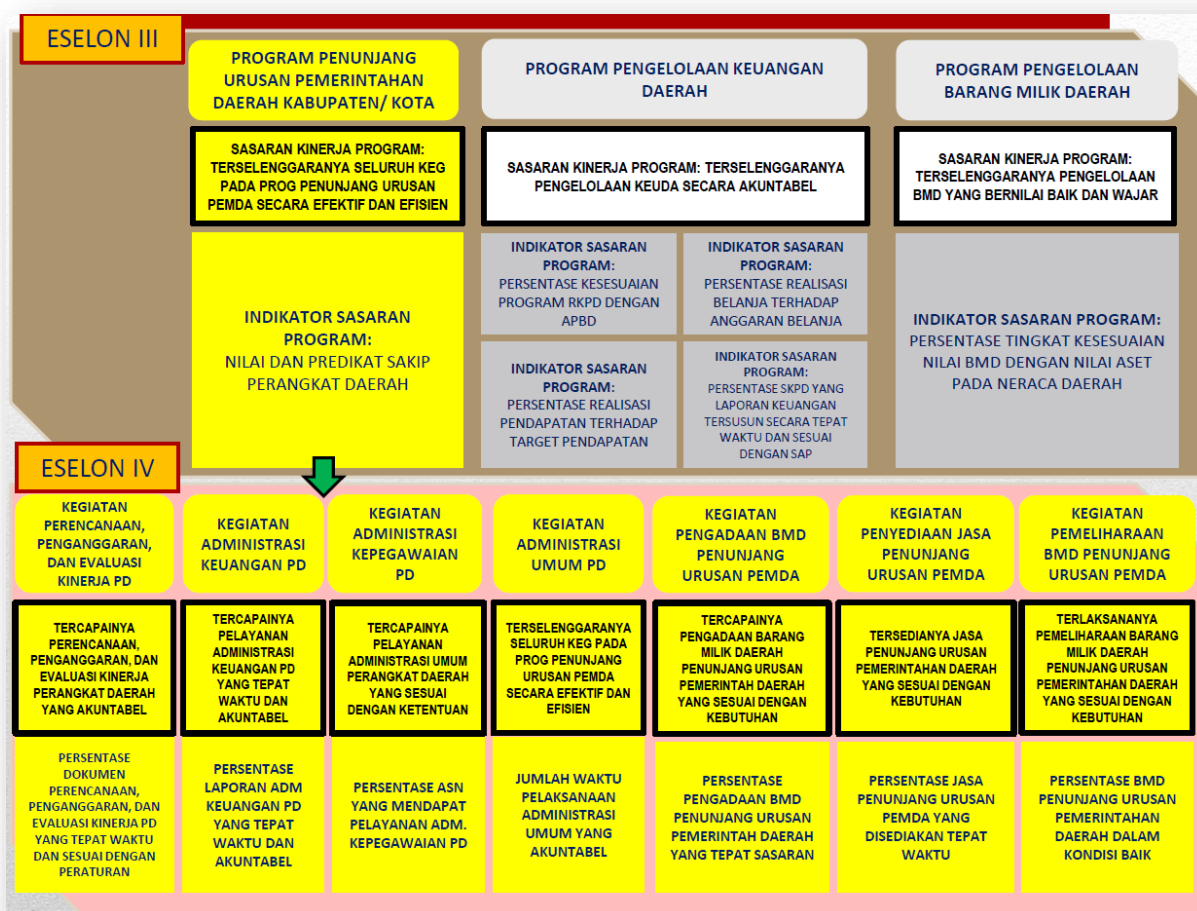
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		17,50		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	B	3,50		
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.					
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/ perangkat daerah.					
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.					
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	B	5,25		
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.					
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaks. oleh SDM yang memadai.					
3	Evaluasi Akunt. Kinerja Internal telah dilaks. dg pendalaman yang memadai.					
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.					
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).					
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	B	8,76		
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.					
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.					

3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.		
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.		
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		

LAMPIRAN

POHON KINERJA BPKAD KABUPATEN BLITAR





ESELON IV/ JF

SUB. KEG. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PD Jumlah Dok Perencanaan PD	SUB. KEG. PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN SUB. KEG. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUIJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD SUB. KEG. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Lap Keu Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keu Akhir Tahun SKPD	SUB. KEG. BIMTEK IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Per UU	SUB. KEG. PENY. KOMP. INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR SUB. KEG. PENY. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR SUB. KEG. PENY. BAHAN LOGISTIK KANTOR SUB. KEG. PENY. BARANG CET & PENGGANDAAN SUB. KEG. PENYELENGGARAAN RAKOR & KONSULTASI SKPD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jml Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Lap.Peny. Rakor & Konsultasi SKPD	SUB. KEG. PENGADAAN KEND. DINAS OPERASIONAL ATAU LAP SUB. KEG. PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA SUB. KEG. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA Jumlah Unit Kendaraan Dinas Ops atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SUB. KEG. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT SUB. KEG. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK SUB. KEG. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SUB. KEG. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERUJIAN KEND. DINAS OPERASIONAL LAPANGAN SUB. KEG. PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA SUB. KEG. PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA INDIKATOR SUB.KEG: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi
---	--	---	--	---	---	---

ESELON III**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

SASARAN KINERJA PROGRAM:
TERSELENGGARANYA SELURUH KEG PADA PROG PENUNJANG URUSAN PEMDA SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN

INDIKATOR SASARAN PROGRAM:
NILAI DAN PREDIKAT SAKIP PERANGKAT DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SASARAN KINERJA PROGRAM: TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN KEUDA SECARA AKUNTABEL

INDIKATOR SASARAN PROGRAM:
PERSENTASE KESESUAIAN PROGRAM RKPD DENGAN APBD

INDIKATOR SASARAN PROGRAM:
PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN TERHADAP TARGET PENDAPATAN

INDIKATOR SASARAN PROGRAM:
PERSENTASE REALISASI BELANJA TERHADAP ANGGARAN BELANJA

INDIKATOR SASARAN PROGRAM:
PERSENTASE SKPD YANG LAPORAN KEUANGAN TERUSUN SECARA TEPAT WAKTU DAN SESUAI DENGAN SAP

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

SASARAN KINERJA PROGRAM: TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN BMD YANG BERNILAI BAIK DAN WAJAR

INDIKATOR SASARAN PROGRAM:
PERSENTASE TINGKAT KESESUAIAN NILAI BMD DENGAN NILAI ASET PADA NERACA DAERAH

ESELON IV

KEGIATAN KOORDINASI & PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH

TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

PERSENTASE PENYEDIAAN DOKUMEN PENGANGGARAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI KETENTUAN

KEGIATAN KOORDINASI & PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

PERSENTASE TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH SESUAI RENCANA

KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

PERSENTASE SKPD YANG MENDAPATKA SUPERVISI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

TERSELENGGARANYA PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN

PERSENTASE REALISASI DANA BANTUAN KEUANGAN, BAGI HASIL, DAN DANA DARURAT

ESELON IV/ JF



ESELON IV/ JF

ESELON IV/ JF	KOORDINASI & PENGELOLAAN KASDA	KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DAERAH	
	PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN & PENERBITAN ANGGARAN KAS & SPD KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI SINKRONISASI SUPERVISI, MONEV PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAP REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS DAERAH, & LAPORAN ARUS KAS DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN & PENYETORAN PERHIT FIAK KETIGA (PFK) REKONS DATA PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN & PEMOTONGAN ATAS SP2D DGN INSTANSI TERKAIT PENY JUKNIS ADM KEU YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN PEMBINAAN PENTAAUSAHAAN KEU PEMDA	REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN LO & BEBAN KONSOLIDASI LAP KEU SKPD, BLUD & LAP KEU PEMDA KOORD & PENY RANC PERDA TTG PERTANGGUNGJAWABAN PELAK APBD KAB /KOTA DAN RANC PERKADA TTG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAK APBD KAB/ KOTA PENY TANGGAPAN/ TINDAK LANJUT THD LHP BPK ATAS LAPPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOORD SINKRONISASI & PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN & TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH PENY KEBU & PTO PENYELENGGARAAN AKUNT PEMDA PEMBINAAN AKUNTANSI PELAP & PERTANGGUNGJAWABAN PEMKAB/ KOTA	ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/ KOTA
TERSUSUNNYA KUA DAN PPAS TERSUSUNNYA PERUBAHAN KUA DAN PERUB PPAS TERLAKSANANYA VERIFIKASI RKA-SKPD TERLAKSANANYA VERIFIKASI DPA-SKPD TERSUSUNNYA PERDA TTG APBD DAN PERKADA TTG PENJABARAN APBD TERSUSUNNYA PERDA TTG PERUB APBD DAN PERKADA TTG PENJABARAN PERUB APBD TERSUSUNNYA REGULASI KEBIJAKAN BID ANGGARAN	TERLAKSANA NYA KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH TERLAKSANANYA KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONEV PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA TERLAKSANANYA REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DGN INSTANSI TERKAIT TERLAKSANA NYA PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAP REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KASDA, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIAK KETIGA (PFK) TERSEDIA NYA JUKNIS ADMINKEU YANG BERKAITAN DGN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN & PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN TERLAKSANANYA PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEU PEMKAB /KOTA	TERLAKSANA NYA AKUNTANSI PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS DAERAH TERLAKSANA NYA REKONSILIASI, VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN LO, BEBAN TERLAKSANA NYA KONSOLIDASI LK SKPD, BLUD, DAN LK PEMDA TERLAKSANANYA KOORDINASI & PENYUSUNAN RANPERDA DAN RANPERBUP TERLAKSANANYA PENYUSUNAN TANGGAPAN / TL TERHADAP LHP BPK DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD TERLAKSANA NYA KOORDINASI SINKRONISASI PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBEND & TGR TERSUSUNNYA KEBIJAKAN DAN PTO PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMDA TERLAKSANA NYA PEMBINAAN AKUNTANSI PELAPORAN & PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH KAB/ KOTA	TERSEDIA NYA ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BK TERKELOLANYA DANA DARURAT DAN MENDESAK TERKELOLANYA DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA

ESELON IV/ JF		ESELON IV/ JF		ESELON IV/ JF	
KOORDINASI & PENGELOLAAN KASDA PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN & PENERBITAN ANGGARAN KAS & SPD KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI SINKRONISASI SUPERVISI, MONEV PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAP REALISASI PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS DAERAH, & LAPORAN ARUS KAS DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN & PENYETORAN PERHIT FIAK KETIGA (PFK) REKONS DATA PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN & PEMOTONGAN ATAS SP2D DGN INSTANSI TERKAIT PENY JUKNIS ADM KEU YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN PEMBINAAN PENTAAUSAHAAN KEU PEMDA		REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN LO & BEBAN KONSOLIDASI LAP KEU SKPD, BLUD & LAP KEU PEMDA KOORD & PENY RANC PERDA TTG PERTANGGUNGJAWABAN PELAK APBD KAB /KOTA DAN RANC PERKADA TTG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAK APBD KAB/ KOTA PENY TANGGAPAN/ TINDAK LANJUT THD LHP BPK ATAS LAPPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOORD SINKRONISASI & PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN & TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH PENY KEBU & PTO PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMDA PEMBINAAN AKUNTANSI PELAP & PERTANGGUNGJAWABAN PEMKAB/ KOTA		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/ KOTA Jml Lap Hasil Analisis Perencanaan & Penyaluran BK Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	
SUB.KEG. KOORD PENY KUA DAN PPAS SUB.KEG. KOORD PENY PERUB KUA DAN PERUB PPAS SUB.KEG. KOORD PENY DAN VERIFIKASI RKA SKPD SUB.KEG. KOORD PENY DAN VERIFIKASI DPA SKPD SUB.KEG. KOORD & PENY PERDA TTG APBD DAN PERKADA TTG PENJABARAN APBD SUB.KEG. KOORD DAN PENY PERDA TTG PERUB APBD DAN PERKADA TTG PENJABARAN PERUBAHAN APBD SUB.KEG. KOORD & PENY REGULASI SERTA KEBU BID ANGGARAN		Jml Dok Hasil Koordinasi & Pengelolaan Kasda Jml Dok Hasil Pengendalian & Penerbitan Anggaran Kas & SPD Jml Dok Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan & Dana Transfer Lainnya Jml Lap Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kasda, Lap Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Lap Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Lap Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lap Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jml Dok Hasil Rekon Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jml Juknis Admin Keu yg Berkaitan dengan Penerimaan, Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jml Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keu Pemerintah Kab/ Kota		Jml Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan & Pengeluaran Kasda Jml Dok Hasil Rekon & Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Jml Lap Keu SKPD, BLUD & Lap Keu Pemda yang Terkonsolidasi Jml Ranperda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota & Ranperkada ttg Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jml Dok Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Jml Dok Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jml Kebj dan PTO Penyelenggaraan Akuntansi Pemda Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kab/ Kota	
Jumlah Dok KUA dan PPAS yang Disusun Jumlah Dok Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Dok Regulasi serta Kebijakan Bid. Anggaran					

